

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK**

**PELAKSANAAN TUGAS DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEBERSIHAN DALAM PENGAWASAN SAMPAH PASAR
KAYUJATI TEMBILAHAN KABUPATEN
INDRAGIRI HILIR**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau

Oleh :

**Rendy Suwito
NPM : 157310554**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU
2021**

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai prasyarat untuk menyelesaikan Studi Strata-1 atau SI pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau (UIR). Shalawat beriring salam penuh kerinduan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, manusia mulia sepanjang zaman, beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah membawa kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan dan peradaban.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempumaan dan masih banyak terdapat kekurangan, baik dari segi tata bahasa, teknik penulisan, segi bentuk ilmiahnya, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan berbagai kritik dan saran perbaikan demi kesempurnaannya.

Dalam penyusunan skripsi yang berjudul **Pelaksanaan Tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Dalam Pengawasan Sampah Pasar Kayujati Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir**, tidak terlepas dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak yang memungkinkan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu, rasa terima kasih sedalam-dalamnya penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Safrinaldi, SH. M.CL selaku Rektor Universitas Islam Riau, yang telah memberikan fasilitas dan kesempatan kepada penulsi dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan ini.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP, M.Si, selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
4. Bapak Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP. M.Si selaku Dosen Pembimbing atas bimbingan, motivasi, nasehat, dan pengarahan yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi penulis.
6. Bapak-bapak, Ibu-Ibu Karyawan-Karyawati Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
7. Bapak Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir beserta staf dan pegawai yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini dengan data-data dan solusi yang penulis butuhkan.
8. Ayahanda dan Ibunda tersayang atas curahan kasih sayang, untaian doa, serta motivasi tiada henti dan sangat besar yang tak ternilai harganya bagi penulis. Terima kasih atas semua yang telah engkau berikan, tak akan aku

kurangi bakti dan cintaku padamu, dan hanya Allah SWT lah yang mampu membalasnya.

9. Teman-teman seperjuangan angkatan 2015; terima kasih atas semuanya.

Hari-hari perkuliahan bersama kalian susah untuk dilupakan dan kupastikan kalian menjadi suatu kenangan yang terindah dalam hidup ini.

Akhirnya kepada Allah SWT penulis memohon seraoga bimbingan, bantuan, pengorbanan dan keikhlasan yang telah diberikan selama ini akan menjadi amal kebaikan dan mendapatkan balasan yang layak dari Allah SWT, Amin Yarabbal Alamin

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekanbaru, Juni 2021

Penulis Ttd.

Rendy Suwito

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTARTABEL.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	9
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR.....	10
A. Studi Kepustakaan.....	10
B. Penelitian Terdahulu.....	24
C. Kerangka Pikir.....	27
D. Konsep Operasional	28
E. Operasional Variabel.....	29
BAB III METODE PENELITIAN.....	32
A. Tipe Penelitian.....	32
B. Lokasi Penelitian	32
C. Informan	33
D. Jenis dan Sumber Data	33
E. Teknik Pengumpulan Data	34
F. Teknik Analisis Data	34
G. Jadwal Kegiatan Penelitian.....	35
BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	38
A. Gambaran Umum Kabupaten Indragiri Hilir	38

B. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir	41
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	60
A. Identitas Informan	60
B. Hasil Penelitian Pelaksanaan Tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Dalam Pengawasan Sampah Pasar Kayujati Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.....	61
C. Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Dalam Pengawasan Sampah Pasar Kayujati Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	90
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	93
A. Kesimpulan	93
B. Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA.....	95

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
II.1. Penelitian Terdahulu	24
II.2 Konsep Operasional Variabel Pelaksanaan tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam pengawasan sampah Pasar Kayujati Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	30
III.1 Identitas Informan Penelitian	33
III.1 Jadwal waktu penelitian tentang Pelaksanaan tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam pengawasan sampah Pasar Kayujati Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	37

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian seminar skripsi yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rendy Suwito
NPM : 157310554
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S. 1)
Judul Skripsi : Pelaksanaan tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam pengawasan sampah Pasar Kayujati Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian seminar skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya palagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian usulan penelitian yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, Juni 2021



**PELAKSANAAN TUGAS DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEBERSIHAN DALAM PENGAWASAN SAMPAH PASAR
KAYUJATI TEMBILAHAN KABUPATEN INDRAGIRI
HILIR**

ABSTRAK

Oleh

Rendy Suwito

Sampah yang dihasilkan Pasar Kayujati kebanyakan sampah organik dan juga anorganik. Menurut survei langsung ke Pasar Kayujati sampah organik dan anorganik berserakan begitu saja di tepi pasar yang jaraknya tidak jauh. Sampah ditumpuk di tepi parit tepatnya dibawah jembatan dengan tidak dipilah terlebih dahulu. Banyak juga sampah berserakan di sudut-sudut pasar dan juga di gorong-gorong, dan ketersediaan tempat pembuangan sementara (TPS) yang minim dan jauh dari lokasi pasar, yang menyulitkan pedagang membuang sampah sehingga sampah yang ada ditumpukkan di tepi parit dan di tepi jalan pasar. Banyaknya orang yang ada di pasar membuang sampah sembarangan membuat lingkungan pasar menjadi tidak nyaman. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis dan menjelaskan pelaksanaan tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam pengawasan sampah Pasar Kayujati Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir serta faktor penghambatnya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, pengamatan dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini yaitu Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir, Pengawas Kebersihan, Tenaga kebersihan pasar serta pedagang pasar. Hasil penelitian yaitu pelaksanaan tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Dalam Pengawasan Sampah Pasar Kayujati Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir dalam kategori cukup terlaksana. Hal ini dilihat dari pengangkutan sampah yang tidak dilakukan secara rutin dan tepat waktu serta kurangnya tenaga kebersihan di pasar. Faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam pengawasan sampah Pasar Kayujati Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir adalah kurangnya sumber daya manusia yang belum memadai dilihat dari segi jumlah dan kualitas, kemudian sarana prasarana yang tidak didukung dengan kegiatan perawatan dan perbaikan alat, sehingga pengolahan sampah di Pasar Kayujati Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir terhambat karena kondisi peralatan yang rusak.

Kata Kunci : Pelaksanaan, Pengawasan, Sampah, Pasar

**IMPLEMENTATION OF DEPARTMENT OF ENVIRONMENT AND
CLEANING IN MARKET WASTE SUPERVISION KAYUJATI
TEMIBILAHAN INDRAGIRI REGENCY DOWNSTREAM**

ABSTRACT

By

Rendy Suwito

The waste produced by Kayujati Market is mostly organic and inorganic waste. According to a direct survey to the Kayujati Market, organic and inorganic waste was just scattered on the edge of the market which was not far away. Garbage is piled up on the edge of the trench under the bridge without being sorted first. There is also a lot of garbage scattered around the corners of the market and also in culverts, and the availability of temporary disposal sites (TPS) are minimal and far from the market location, which makes it difficult for traders to dispose of their waste so that the existing waste is piled up on the edge of the ditch and on the side of the market road. The number of people in the market littering makes the market environment uncomfortable. The purpose of this study is to analyze and explain the implementation of the duties of the Environmental and Hygiene Service in supervising the waste at the Kayujati Tembilahan Market, Indragiri Hilir Regency and the inhibiting factors. The research method used is a qualitative method with data collection through interviews, observations and documentation. The informants in this study were the Head of the Department of Environment and Hygiene, Indragiri Hilir Regency, Hygiene Supervisors, market cleaners and market traders. The result of the research is that the implementation of the tasks of the Department of Environment and Hygiene in Supervision of Waste at the Kayujati Tembilahan Market, Indragiri Hilir Regency, is in the fairly implemented category. This can be seen from the waste transportation that is not carried out regularly and on time and the lack of cleaning staff in the market. The inhibiting factors in carrying out the duties of the Environment and Hygiene Service in supervising the waste at the Kayujati Tembilahan Market, Indragiri Hilir Regency, are the lack of inadequate human resources in terms of quantity and quality, then infrastructure facilities that are not supported by maintenance and repair activities. Waste processing at the Kayujati Tembilahan Market, Indragiri Hilir Regency is hampered due to the condition of damaged equipment.

Keywords: Implementation, Supervision, Garbage, Market

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan di bentuknya Negara Republik Indonesia dalam pembukaan UU 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social. Untuk mencapai tujuan Negara tersebut di susunlah pemerintahan secara bertingkat mulai dari pusat sampai ke daerah. Hal ini sejalan dengan isi Pasal 18 UU Dasar 1945 menjelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam rangka mewujudkan tujuan negara sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan UU Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, maka disusunlah Pemerintahan Indonesia sebagai Negara Kesatuan yang mempunyai 2 bentuk pemerintahan yaitu pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Dalam pasal 18 disebutkan wilayah Indonesia di bagi atas wilayah provinsi dan provinsi dibagi kedalam Kabupaten atau Kota.

Menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Tugas-tugas pokok tersebut

dapat diringkas menjadi 3 (tiga) fungsi hakiki yaitu: pelayanan (*service*), pemberdayaan (*empowerment*), dan pembangunan (*development*). Pelayanan akan membuahkan keadilan dalam masyarakat, pemberdayaan akan mendorong kemandirian masyarakat, dan pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat.

Pelaksanaan otonomi daerah sebagai konsekuensi dilaksanakannya asas desentralisasi memang telah banyak memberikan angin segar, terutama terhadap daerah. Dengan dijalankan sistem desentralisasi ini berarti daerah diberikan kewenangan yang luas untuk mengatur rumah tangganya secara otonom. Pada hakikatnya tujuan dari keberadaan otonomi daerah ini adalah untuk memberi peluang pada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan-urusan pemerintahan baik urusan wajib maupun urusan pilihan.

Dalam rangka memberikan jaminan terhadap kedudukan, tugas dan wewenang Pemda, maka dikeluarkanlah UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Sesuai dengan yang telah diamanatkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU ini menekankan pada daerah agar mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Berdasarkan pasal 9 UU No. 23 Tahun 2014 bahwa pemerintah pusat menyerahkan sejumlah urusan pada daerah, Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan tersebut yaitu :

- a. Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

- b. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.
- c. Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas :

1. Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, terdiri dari :
 - a) Pendidikan
 - b) Kesehatan
 - c) pekerjaan umum dan penataan ruang
 - d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman.
 - e) ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat
 - f) social
2. Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, terdiri dari :
 - a) tenaga kerja;
 - b) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c) pangan;
 - d) pertanahan;
 - e) lingkungan hidup;
 - f) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - g) pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 - h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - i) perhubungan;
 - j) komunikasi dan informatika;
 - k) koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - l) penanaman modal;
 - m)kepemudaan dan olah raga;
 - n) statistik;
 - o) persandian;

- p) kebudayaan;
- q) perpustakaan; dan
- r) kearsipan.

Berdasarkan Undang-Undang diatas maka masalah persampahan termasuk dalam urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu lingkungan. Sampah merupakan sesuatu yang tidak dipakai, tidak digunakan, tidak disenangi, dan dibuang yang berasal dari hasil kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya (Chandra, 2014). Menurut PP No 81 tahun 2012 pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

Kabupaten Indragiri Hilir terletak dibagian selatan Provinsi Riau dengan ibukotanya adalah Tembilahan dengan luas wilayah 18.812,97 km² yang terdiri dari luas daratan 11.605,97 km², luas perairan laut 6.318 km dan luas perairan umum 888,97 km serta memiliki garis pantai sepanjang 339,5 km.

Kecamatan Tembilahan Hulu adalah salah satu dari 20 Kecamatan yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir yang merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan Tembilahan berdasarkan SK Gubernur Riau tanggal 14 agustus Nomor : kpts.402.a/VIII/1999 dengan ibukotanya Kelurahan Tembilahan Hulu. Kecamatan Tembilahan Hulu mempunyai luas wilayah 180.62 Km² atau 18.062 Ha yang terdiri dari 1 (satu) Kelurahan dan 3 (tiga) Desa.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Indragiri Hilir merupakan satuan kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan, sasaran organisasi dan tata kerja

dinas-dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 17 Tahun 2008 tentang susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir serta didukung pula oleh Keputusan Wali Kabupaten Indragiri Hilir tentang uraian Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pengelolaan Sampah, Kasi Pengurangan dan Pemanfaatan Sampah, Kasi Penanganan dan Pemrosesan Akhir Sampah, dan Kasi Sarana dan Prasarana.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir terdiri dari 1 sekretariat dan 4 bidang teknis yaitu Bidang Tata Lingkungan, Bidang Pengelolaan Sampah, Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Pengelolaan Limbah Beracun dan Berbahaya, serta Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.

Dalam penelitian ini yang melakukan pengelolaan sampah adalah Bidang Pengelolaan Sampah. Tugas pokok bidang pengelolaan sampah adalah membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan pengelolaan sampah. Fungsi bidang pengelolaan sampah meliputi:

- a. perumusan kebijakan dan penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kota,
- b. perumusan dan penetapan target pengurangan sampah.
- c. perumusan kebijakan pengurangan dan pemanfaatan sampah.
- d. pembinaan pembatasan timbunan sampah, penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam, pendaurulangan sampah dan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk.
- e. perumusan kebijakan penanganan dan pemrosesan akhir sampah tingkat kota.
- f. pelaksanaan koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah.

- g. pelaksanaan penetapan lokasi Tempat Penampungan Sementara (TPS), Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah.
 - h. pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan system pembuangan open dumping,
 - i. perumusan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah.
 - j. perumusan pembenan kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah.
 - k. pelaksanaan kerja sama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah.
 - l. pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah.
 - m. perumusan kebijakan dan penyelenggaraan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta.
 - n. perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha).
 - o. pelaksanaan perencanaan, penyediaan dan pemeliharaan fasilitas daur ulang sampah dan sarana prasarana penanganan sampah.
 - p. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- Bidang Pengelolaan Sampah terdiri dari :
- a). Seksi Pengurangan dan Pemanfaatan Sampah
 - b). Seksi Penanganan dan Pemrosesan Akhir Sampah
 - c). Seksi Sarana dan Prasarana

Secara sederhana, sampah digolongkan menjadi 2 yaitu sampah organik dan anorganik. Sampah organik yaitu sampah yang berasal dari makhluk hidup, seperti dedaunan dan sampah dapur. Sampah ini termasuk mudah terurai secara alami (*degradable*). Sampah yang tidak terurai disebut sampah Anorganik (*undegradable*), seperti plastik, kaleng, karet, juga logam (Dedi dan Ratna, 2013).

Volume sampah di kota-kota besar di dunia tahun 2016 telah menghasilkan 1,3 miliar ton sampah pada setiap tahunnya. Keadaan ini akan mencapai 2,2 miliar ton pada tahun 2025. Volume sampah mengalami kenaikan sekitar 77 persen dari realisasi tahun 2016 yang tercatat sebanyak 1,3 miliar ton. Di Indonesia 151.921 ton jumlah sampah padat diproduksi setiap harinya.

Berdasarkan penelitian Zulkarnaini (2009), sampah pasar menjadi salah satu permasalahan sampah yang cukup rumit, karena selain jumlahnya yang relatif banyak, sampah pasar juga memiliki problematika sendiri. Pengelolaan sampah sangat bergantung pada kerjasama dan kesadaran setiap pedagang dan masyarakat yang datang ke pasar, swasta, dan pihak pemerintah (Maryunani, 2013).

Data Statistik Persampahan Indonesia tahun 2008 menunjukkan bahwa jumlah sampah yang diangkut ke Tempat Penampungan Sementara/Tempat Pemrosesan Akhir sebesar 116 juta ton/tahun. TPS bangunan permanen (34%), bangunan semi permanen (39%), dan TPS berupa kontainer saja (27%). Armada truk pengangkut sampah sebagai fasilitas transportasi sampah dimiliki pemerintah sebanyak (97)% sedangkan milik swasta hanya 3%. Adapun TPA terdapat pada semua kota/kabupaten di Indonesia. Berdasarkan Data Statistik Persampahan di Indonesia tahun 2008, jumlah TPA yang masih digunakan di Sumatera (57), Jawa(75), Bali (11), Kalimantan (19), papua(17) (Suwerda, 2012).

Menurut penelitian Widodo (2013), salah satu penyumbang sampah terbesar dalam kehidupan adalah pasar tradisional. Pasar tradisional merupakan salah satu fasilitas umum yang sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk memenuhi berbagai kebutuhan pokok manusia. Namun pasar tradisional kerap dianggap sebagai tempat yang kotor dan beraroma tidak sedap yang disebabkan oleh sampah yang bertebaran dimana-mana. Volume serta sifat sampah yang akan dihasilkan dipengaruhi oleh jenis barang yang diperjualbelikan di pasar.

Sampah pasar biasanya memiliki karakteristik yang khas dimana sampah lebih cepat membusuk, oleh karena itu perlu dilakukan pengelolaan sampah pasar

yang benar sehingga tidak menimbulkan pencemaran disekitar lokasi pasar demi terciptanya kenyamanan untuk masyarakat yang ada di lingkungan pasar. Pasar Kayujati adalah pasar yang setiap harinya memproduksi sampah campuran dari hasil kegiatan jual belinya.

Data Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir menunjukkan jumlah timbunan sampah perhari kurang lebih sebanyak 57,312 Ton, jumlah timbunan sampah perminggu sebanyak 401,18 Ton, jumlah timbunan sampah perbulan sebanyak 1719,36 Ton. Produksi sampah di kawasan Tembilahan Hulu adalah produksi sampah/hari yang paling tinggi diantara wilayah Tembilahan lainnya yaitu 62,858 Ton.

Menurut survei awal Pasar Kayujati terdiri dari 214 pedagang dengan 214 los dan kios, biasanya para pedagang membayar uang lapak kepada pengelola pasar dan membayar uang keamanan. Pasar Kayujati adalah pasar yang beroperasi setiap hari, jenis dagangan yang dijual di Pasar Kayujati adalah kebutuhan sehari-hari seperti sayur-sayuran, daging, sembako, peralatan rumah tangga, juga menjual pakaian bekas.

Berdasarkan pasal 9 yang terdapat pada Perda Kabupaten Indragiri Hilir nomor 11 tahun 2016 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Penindakan Ketertiban Umum dan Penyakit Masyarakat yang menyatakan bahwa setiap orang harus membuang sampah pada tempat sampah yang telah disediakan dan setiap orang dilarang membuang dan menumpuk sampah dijalan, jalur hijau, taman kota, parit, saluran/ drainase, danau dan tempat-tempat laain yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan. Dimana Dinas Lingkungan Hidup dan

Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir telah berkontribusi dalam mensosialisasikan peraturan yang ada, hanya saja di lapangan hal tersebut tidak diberlakukan, hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran pedagang pasar dalam menjaga dan memelihara lingkungan, dan mayoritas pedagang selalu menganggap keterbatasan fasilitas dan SDM.

Sampah yang dihasilkan Pasar Kayujati kebanyakan sampah organik dan juga anorganik. Menurut survei langsung ke Pasar Kayujati sampah organik dan anorganik berserakan begitu saja di tepi pasar yang jarak nya tidak jauh. Sampah ditumpuk di tepi parit tepatnya dibawah jembatan dengan tidak dipilah terlebih dahulu. Banyak juga sampah berserakan di sudut-sudut pasar dan juga di gorong-gorong, dan ketersediaan tempat pembuangan sementara (TPS) yang minim dan jauh dari lokasi pasar, yang menyulitkan pedagang membuang sampah sehingga sampah yang ada ditumpukkan di tepi parit dan di tepi jalan pasar. Banyaknya orang yang ada di pasar membuang sampah sembarangan membuat lingkungan pasar menjadi tidak nyaman. Tentunya hal ini akan merusak ekosistem pasar.

Pasar Kayujati menghasilkan sampah setiap harinya lebih kurang 2000 kg/hari, lalu sampah akan diangkut ke TPA, alat pengangkutan seperti truk sampah ada 1 unit, gerobak sampah ada 1 unit. Biasanya pengangkutan sampah ke TPA dilakukan sebanyak 2 kali sehari dipagi dan disiang hari. Pengangkutan sampah dilakukan oleh petugas TPA sebanyak 5 orang yang ada di truk pengangkut sampah, dan 1 orang yang menggunakan gerobak sampah. Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan, ditemukan fenomena-fenomena sebagai berikut:

1. Masih ditemukan banyaknya sampah yang berserakan di jalan dan pinggiran parit pasar, sehingga mengganggu kenyamanan pembeli karena menimbulkan aroma yang tidak sedap dan menyebabkan terganggunya kenyamanan pedagang dan pembeli di sekitar pasar.
2. Masih kurangnya tempat pembuangan sampah yang tersedia di pasar dan letaknya jauh dari pasar sehingga menyulitkan pedagang membuang sampah. Akibat besarnya jumlah sampah akibat aktifitas pasar seringkali ditemukan banyaknya timbunan sampah yang dihasilkan dari aktifitas pasar.
3. Masih kurangnya pengawasan yang dilakukan secara langsung oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan sehingga sampah masing dibuang atau ditumpuk secara sembarangan.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang terjadi maka peneliti melakukan penelitian dengan judul : **“Pelaksanaan Tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Dalam Pengawasan Sampah Pasar Kayujati Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir”**.

B. Rumusan Masalah

Berpangkal dari latar belakang diatas serta fenomena/gejala yang telah diuraikan, maka masalah pokok yang ingin penulis teliti adalah “bagaimana pelaksanaan tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam pengawasan sampah Pasar Kayujati Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir?”.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini untuk :

- a. Untuk menganalisis dan menjelaskan pelaksanaan tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam pengawasan sampah Pasar Kayujati Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.
- b. Untuk menganalisis dan menjelaskan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam pengawasan sampah Pasar Kayujati Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.

D. Kegunaan Penelitian

Sedangkan kegunaan melakukan penelitian ini antara lain :

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini dilakukan agar dapat bermanfaat dalam bidang ilmu pengetahuan khususnya ilmu pemerintahan dan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penelitian-penelitian yang mempunyai kesamaan.
2. Secara akademis, yaitu sebagai informasi lanjutan bagi peneliti lainnya, terutama penelitian yang mempunyai hubungan yang signifikan dengan penelitian yang sama dengan penelitian ini.
3. Secara praktis, merupakan sumber yang menjadi informasi bagi pihak-pihak yang berperan penting dalam Pelaksanaan tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam pengawasan sampah Pasar Kayujati Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. STUDI KEPUSTAKAAN

1. Pemerintahan

Istilah pemerintah berasal dari kata perintah. Dalam konteks ini Ndraha menyatakan bahwa istilah perintah secara umum dimaknai sebagai yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu atau sesuatu yang harus dilakukan. Dengan demikian, pemerintah dapat diartikan sebagai orang, badan atau aparat yang mengeluarkan atau memberi perintah (dalam Napitupulu, 2012;7). Menurut Napitupulu (2012;9) istilah pemerintah mengandung arti lembaga atau organisasi yang menjalankan kekuasaan pemerintah, sedangkan pemerintahan adalah proses berlangsungnya kegiatan atau perbuatan pemerintah dalam mengatur kekuasaan suatu negara. Dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia yang berdasar pada UUD 1945 istilah pemerintah pertama-tama ditentukan dalam alinea ke empat. Pemerintah dalam hal ini adalah segenap alat perlengkapan negara atau Lembaga-lembaga kenegaraan yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan nasional. Pemerintah dalam arti luas menurut pengertian ini telah mendapatkan penataan melalui UUD 1945. Pemerintah dalam hal ini adalah bagian dari bangsa Indonesia. Karena seluruh bangsa diharapkan menjadi pelaksana pembangunan,, pemerintah adalah juga unsur pelaksana pembangunan tersebut. (Napitupulu, 2012;9-10).

Pemerintah menurut Syafiie (2011;15) secara etimologi pemerintahan

berasal dari kata “pemerintah” yang kemudian mendapat imbuhan sebagai berikut:

- a. Mendapat awalan “pe” menjadi kata “pemerintah” berarti bahan atau organ elit yang melakukan pekerjaan mengatur dan mengurus dalam suatu negara
- b. Mendapat akhiran “an” menjadi kata “pemerintahan” berarti perihal, cara, perbuatan atau urusan dari badan yang berkuasa dan memiliki legitimasi tersebut.

Didalam kata dasar “perintah” paling sedikit ada empat unsur penting yang terkandung, yaitu sebagai berikut:

- a. Ada dua pihak yang memerintah disebut pemerintah dan pihak yang diperintah disebut rakyat
 - b. Pihak yang memerintah memiliki kewenangan dan legitimasi untuk mengaur dan mengurus rakyat
 - c. Pihak yang diperintah memiliki keharusan untuk taat kepada pemerintah yang sah
 - d. Antara pihak yang memerintah dan pihak yang diperintah terdapat hubungan timbal balik, baik secara vertikal maupun horizontal
- (Syafiie, 2011;15)

Pemerintah adalah gejala sosial, artinya terjadi di dalam hubungan antar anggota masyarakat, baik individu dengan individu, kelompok dengan kelompok maupun antar individu dengan kelompok. Gejala ini terdapat pada suatu saat di dalam sebuah masyarakat (Ndraha, 1997;6). Dalam Bahasa Inggris, pemerintahan

disebut government, artinya to steer, mengemudikan atau mengendalikan. Sehingga semula lambang pemerintahan itu berbentuk kemudi kapal.

Pemerintahan adalah suatu ilmu dan seni. Dikatakan sebagai seni karena berapa banyak pemimpin pemerintahan yang tanpa Pendidikan pemerintahan, mampu berkiat serta dengan kharismatik menjalankan roda pemerintahan. Sedangkan sebagai suatu disiplin ilmu pengetahuan adalah karena memenuhi syarat-syaratnya yaitu dapat dipelajari, dan diajarkan, memiliki objek, baik objek materiaa maupun formal, universal sifatnya, sistematis serta spesifik/khas (dalam Syafiie, 2011;20).

Sementara itu menurut Soemendar (dalam Syafiie, 2011;8) pemerintahan sebagai badan yang penting dalam rangka pemerintahannya, pemerintah musti memperhatikan pula ketentraman dan ketertiban umum, tuntutan dan harapan serta pendapat rakyat, kebutuhan dan kepentingan masyarakat, pengaruh-pengaruh lingkungan, pengaturan-pengaturan, komunikasi peran serta seluruh lapisan masyarakat dan legitimasi.

Pemerintah mengandung arti Lembaga atau organisasi yang menjalankan kekuasaan pemerintahan, sedangkan pemerintahan adalah proses berlangsungnya kegiatan atau perubahan pemerintah dalam mengatur kekuasaan suatu negara.

Dari keseluruhan defines tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintahan adalah kelompok orang-orang tertentu secara baik dan benar serta indah melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam mengkoordinasikan, memimpin dalam hubungan antara dirinya dengan masyarakat, antara departemen dan unit dalam tubuh pemerintahan itu sendiri.

Rasyid membagi fungsi pemerintahan menjadi 4 bagian yaitu pelayanan (public service), pembangunan (development), pemberdayaan (empowering), dan pengaturan (regulation), (Labolo, 2006;22). Untuk mengetahui suatu masyarakat, maka lihatlah pemerintahannya, artinya fungsi-fungsi pemerintahan yang dijalankan pada saat tertentu akan menggambarkan kualitas pemerintahan itu sendiri. Jika pemerintah dapat menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik, tugas pokok selanjutnya adalah bagaimana pelayanan dapat membuahkan keadilan, pemberdayaan yang membuahkan kemandirian serta pembangunan yang menciptakan kemakmuran. Terkait dengan pelayanan menurut Ndraha lebih menitik beratkan pada aspek pelayanan sebagai fungsi pokok yang mesti dilakukan oleh pemerintah. Pelayanan itu dikelompokkan menjadi layanan sipil dan jasa public.

Organisasi adalah sebagai kerangka struktur dimana pekerjaan dari beberapa orang diselenggarakan untuk mewujudkan suatu tujuan bersama (menurut Millet dalam Syafiie (2011;11))

Definisi organisasi menurut Syafiie (2011;12) adalah sebagai suatu alat saling hubungan satuan-satuan kerja yang memberikan mereka kepada orang-orang yang ditempatkan dalam struktur kewenangan jadi dengan demikian pekerjaan dapat dikoordinasikan oleh pemerintah dari atasan kepada para bawahan yang menjangkau dari puncak sampai kedasar dari seluruh badan usaha.

2. Konsep Kebijakan dan Implementasi Kebijakan

Menurut Suryadi (1975 : 64), Pembuatan kebijakan merupakan sebuah aktifitas yang diarahkan tujuannya, sebagai yang memiliki cirri tersendiri dari

aktifitas fisik dan ekspresif murni yang bertujuan untuk mempengaruhi prospektif (masa depan) alternative dalam arah yang dikehendaki.

Menurut Van Meter dan Horn (1974) dalam buku Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti (2012:20-21) mendefinisikan Implementasi secara lebih spesifik yaitu: *“Policy Implementation encompasses those actions by public or private individuals (or group) that are directed at the achivement of policy decisions”* yang artinya Implementasi merupakan tindakan oleh individu, pejabat, atau kelompok badan pemerintah yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam suatu keputusan tertentu. Badan-badan tersebut melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pemerintah yang membawa dampak pada warga negaranya.

Menurut Pressman dan Wildavsky (2012:20) dalam Implementasi Kebijakan Publik, definisi Implementasi adalah menjalankan atau melaksanakan suatu kebijakan (*to carry out*), untuk memenuhi janji-janji sebagaimana dinyatakan dalam dokumen kebijakan (*to fulfill*), untuk menghasilkan *output* sebagaimana dinyatakan dalam tujuan kebijakan (*to produce*) untuk menyelesaikan misi yang harus diwujudkan dalam tujuan kebijakan (*to complete*).

Dunn (2003 : 22) mengemukakan bahwa proses pembuatan kebijakan adalah serangkaian aktifitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis. Aktifitas politik tersebut dijelaskan sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung yang diatur menurut urutan waktu, penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan. Kemudian pembuatan kebijakan merupakan

sebuah aktifitas yang diarahkan tujuan, sebagai yang memiliki cirri tersendiri dan aktifitas fisik dan ekspresif murni yang bertujuan untuk mempengaruhi prospektif, alternatif dalam arah yang dikehendaki. Selanjutnya Hessel menyebutkan bahwa pengembangan kebijakan adalah lebih luas dan berkenaan dengan peningkatan pembuatan keputusan antar pemerintah sebagai suatu keseluruhan.

Sementara itu Suharto (2005 : 7) mengatakan kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu. Setiap kebijakan yang akan dibuat harus pula memiliki tolak ukur agar setiap Kebijakan publik itu bisa berjalan secara efektif.

Menurut Soetopo (2005 : 10) kebijakan publik adalah suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah atau Negara yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat. Kebijakan publik bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah yang ada didalam masyarakat. Kemudian Kaplan mendefenisikan Kebijakan publik sebagai suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu, nilai-nilai tertentu dan praktek-praktek tertentu. Selanjutnya Friedrik mengatakan Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan ancaman dan peluang yang ada. Dan kebijakan pemerintah merupakan suatu usaha untuk memproses nilai pemerintah yang bersumber pada kearifan pemerintah dan mengikat secara formal, etik dan moral, diarahkan guna menempati pertanggung jawaban aktor pemerintah dalam lingkungan pemerintahan (dalam Islamy, 1997 :

Menurut Anderson merumuskan kebijaksanaan sebagai rangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang dilakukan sejumlah aktor (pejabat, kelompok dan instansi pemerintah) dengan adanya masalah atau persoalan yang dihadapi (dalam Wahab, 2004 : 13). Sedangkan Van Doom dan Lammer (dalam Hogerwerf, 1983 : 7) mengemukakan kebijaksanaan sebagai suatu rencana aksi, suatu susunan sasaran dan tujuan.

Menurut Friedrik (dalam Syafi'ie, 2005 : 107) kebijakan pemerintah adalah suatu usulan tindakan oleh seseorang, kalangan pemerintah pada suatu lingkungan, politik tatanan mengenai hambatan, peluang yang dapat diatasi, dimanfaatkan suatu kebijakan dalam mencapai tujuan, merealisasikan suatu maksud. Menurut Hogerwerf kebijaksanaan adalah membangun masyarakat yang terarah dengan pemakaian kekuasaan. Sedangkan Anderson mengatakan kebijaksanaan adalah sebagai suatu tindakan tertentu yang bertujuan, diikuti oleh seorang aktor atau sejumlah actor yang berhubungan dengan masalah tertentu yang dihadapi.

Menurut Irfan (1991 : 17) kebijakan adalah serangkaian tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan adanya hambatan dan kesempatan terhadap usulan kebijaksanaan tersebut guna mencapai suatu tujuan.

Kebijakan publik menurut Nugroho (2007 : 36-37) adalah keputusan otoritas negara yang bertujuan mengatur kehidupan bersama. Tujuan dari kebijakan publik dapat dibedakan dari sisi sumber daya yaitu antara kebijakan publik yang bertujuan mendistribusikan sumber daya negara dan yang bertujuan

menyerap sumber daya negara. Analisis kebijakan adalah pemahaman mendalam akan suatu kebijakan atau pula pengkajian untuk merumuskan suatu kebijakan.

Menurut George C. Edward III dalam Agustino (2006 : 149) mengatakan untuk menentukan keberhasilan Implementasi suatu kebijakan terdapat empat variabel, yaitu:

1. Komunikasi

Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan apabila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakandan peraturan implementasi harus ditansmisikan (dikomunikasikan).

2. Sumberdaya

Maksudnya bagaimana kepatuhan para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementator haarus mengetahui apakah orang lain yang terlibat didalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum. Dalam konteks lain, ketika wewenang formal ada, maka sering terjadikesalahan dalam melihat efektifitas kewenangan dan fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan.

3. Disposisi

Disposisi atau sikap dari para pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan

tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksananya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias.

4. Struktur birokrasi

Walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan kebijakan, mungkin kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan atau terealisasi karena terdapatnya kelemahan dalam birokrasi. Kebijakan begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebarkan sumberdaya-sumberdaya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.

3. Kebijakan Pemerintahan

Untuk memecahkan, mengurangi atau mencegah terjadinya suatu masalah, diperlukan suatu kebijakan yang diformulasikan dengan mempunyai fungsi dan sasaran tertentu, di mana untuk mencapai tujuan dan sasaran dari kebijakan tertentu diperlukan suatu implementasi dari kebijakan itu sendiri yang merupakan proses lebih lanjut dari tahap formulasi kebijakan hal ini sesuai dengan pendapat (Abidin, 2002: 20).

Banyak pakar menyebutkan bahwa kebijakan pemerintah sebagai kekuasaan mengalokasikan nilai-nilai untuk masyarakat secara keseluruhan. Ini mengandung konotasi tentang kewenangan pemerintah yang meliputi keseluruhan kehidupan masyarakat. Tidak ada suatu organisasi lain yang wewenangnya mencakup seluruh masyarakat. Tidak ada suatu organisasi lain yang wewenangnya mencakup seluruh masyarakat kecuali pemerintah. Menurut Carl Friedman mengatakan bahwa yang paling pokok bagi suatu kebijakan adalah tujuan (*goal*), sasaran (*objective*), atau kehendak (*purpose*). (Abidin, 2002:20)

Menurut Ndraha (2003:493-494), kebijakan yaitu pilihan terbaik dalam usaha untuk memproses nilai pemerintahan yang bersumber pada kearifan pada batas-batas kompetensi aktor atau lembaga yang bersangkutan dan mengikat pertanggung jawaban secara formal, etika, maupun moral serta diarahkan guna menepati pertanggung jawaban aktor pemerintahan dalam lingkungan pemerintahan.

Perbuatan kebijakan merupakan sebuah aktivitas yang diarahkan tujuannya, sebagai yang memiliki ciri tersendiri dari aktivitas fisik dan ekspresif murni, yang bertujuan untuk mempengaruhi prospektif (masa depan) alternatif dalam arah yang dikehendaki. (Tangkilisan, 2003:6)

Menurut Koryati (2005:7) mengatakan bahwa secara umum kebijakan dapat dikatakan sebagai rumusan keputusan pemerintah yang menjadi pedoman tingkah laku guna mengatasi masalah publik yang mempunyai tujuan, rencana dan program yang akan dilaksanakan secara jelas.

Kemudian Ibrahim (2004:2) mengemukakan bahwa kebijakan itu adalah prosedur memformulasikan sesuatu berdasarkan aturan tertentu, disebutkan juga bahwa kebijaksanaan itu bentuknya nyata (praktis) dari kebijakan.

Kebijakan publik menurut Dwijowijoto (2008:58) adalah keputusan yang dibuat oleh Negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan Negara yang bersangkutan. Kebijakan publik adalah strategi untuk mengantar masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju pada masyarakat yang dicita-citakan.

Menurut friedrick (dalam Dwijowijoto, 2008:53) mendefenisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, dengan ancaman dan peluang yang ada kebijakan yang diusulkan tersebut ditujukan untuk memanfaatkan potensi sekaligus mengatasi hambatan yang ada dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Menurut Thomas (dalam Dwijowijoto, 2008:54) Kebijakan publik adalah sebagai segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan hasil yang membuat sebuah kehidupan bersama tampil berbeda.

Sedangkan menurut Nugroho (2004:101) bahwa perumusan kebijakan adalah inti dari kebijakan publik yang dilihat dari kebijakan publik yang ditujukan untuk melakukan intervensi terhadap kehidupan publik untuk meningkatkan kehidupan publik itu sendiri yang dinilai dari ketersediaan kemampuan sumber daya manusia.

Dengan demikian dapat disimpulkan berdasarkan pendapat diatas bahwa yang disebut kebijakan pemerintah adalah suatu formulasi berupa keputusan

tetap yang dikeluarkan pemerintah dan berlaku umum untuk mempengaruhi tujuan sesuai dengan arah yang dikehendaki, demi kepentingan publik.

4. Konsep Pengawasan

Tery (dalam Salam, 2007 : 23) merumuskan pengawasan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar , apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, dan bilamana perlu melakukan perubahan-perubahan sehingga pelaksanaan sesuai dengan perencanaan, yaitu selaras dengan panduan.

Menurut Manullang (2004 : 13) pengawasan dapat diartikan sebagai proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.

Pengawasan menurut Feriyanto (2015:63) merupakan fungsi manajerial yang keempat setelah perencanaan, pengorganisasian dan pengarahan. Sebagai salah satu fungsi amanjemen, mekanisme pengawasan didalam suatu organisasi memang mutlak diperlukan. Pelaksanaan suatu rencana atau program tanpa diringi dengan suatu system penagwasan yang baik dan berkesinambungan, jelas akan mengakibatkan lambat-lambatnya atau bahkan tidak tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditentukan. Adapun tahap-tahap proses pengawasan, antara lain (Feriyanto, 2015:63):

a. Tahap penetapan standar

Tujuannya adalah sebagai sasaran, kuota dan target pelaksanaan kegiatan yang digunakan sebagai patokan dalam pengambilan keputusan.

b. Tahap penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan

Digunakan sebagai dasar atas pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara tepat

c. Tahap pengukuran pelaksanaan kegiatan

Beberapa proses yang berulang-ulang dan kontinu yang berupa pengamatan, laporan, metode, pengujian dan sampel

d. Tahap pembandingan pelaksanaan dengan standard an analisa penyimpangan

Digunakan untuk mengetahui penyebab terjadinya penyimpangan dan menganalisisnya juga digunakan sebagai alat pengambilan keputusan

e. Tahap pengambilan tindakan koreksi

Bila diketahui dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan, dimana perlu ada perbaikan dalam pelaksanaan.

Luther Gulick dan L. Urwick dalam Ndraha (2003;12) mengemukakan bahwa Control merupakan suatu proses. Proses tersebut berlangsung di bawah empat prinsip control yang juga prinsip organisasi. Keempat prinsip itu adalah:

1. Koordinasi sebagai hubungan timbal balik semua faktor di dalam suatu situasi,
2. Koordinasi dengan kontak langsung antar manusia yang berkepentingan,
3. Koordinasi pada tahap awal setiap kegiatan,
4. Koordinasi sebagai sebuah proses yang berjalan terus menerus.

Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang akan dilaksanakan, menilai dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan semula (Manulang, 2004;136).

Pengawasan terhadap segala tindakan pemerintah daerah termasuk juga keputusan kepala daerah dan peraturan daerah memiliki sifat :

- a. Pengawasan prefentif yaitu pengawasan dilakukan sesudah keputusan daerah ditetapkan tetapi sebelum keputusan itu mulai berlaku.
- b. Pengawasan represif yaitu pengawasan dilakukan sebelum keputusan-keputusan atau peraturan daerah tersebut dikeluarkan atau dibuat.
- c. Pengawasan umum yaitu pengawasan terhadap keseluruhan pelaksanaan tugas dan wewenang perintah daerah dan komponen-komponen dalam lingkungan departemen dalam negeri.

Menurut Feriyanto (2015:67), syarat-syarat pengwasan antara lain :

1. Pengawasan harus mendukung sifat dan kebutuhan kegiatan
2. Pengawasan harus melaporkan setiap penyimpangan yang terjadi
3. Pengawsan harus mempunyai pandangan ke depan
4. Pengawasan harus objektif, teliti dan sesuai dengan standar
5. Pengawasan harus luwes atau fleksibel
6. Pengawsan harus serasi dengan pola organisasi
7. Pengawsan harus ekonomis
8. Pengawasan harus mudah dimengerti
9. Pengawasan harus diikuti dengan perbaikan atau koreksi

Menurut Siagian (2003 : 115) agar pengawasan dapat berjalan efektif dan efesien, dapat digunakan beberapa teknik pengawasan yaitu :

- a. Teknik pengawasan langsung, yaitu apabila pemimpin organisasi atau pemerintahan melakukan sendiri pengawasan terhadap kegiatan sedang

dijalankan dengan beberapa bentuk seperti inspeksi langsung.

- b. Teknik pengawasan tidak langsung, yaitu pengawasan dari jarak jauh, pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh bawahannya yang berbentuk laporan tulisan dan lisan.

Prinsip pengawasan memastikan pelaksanaan pekerja sesuai rencana, sehingga harus ada perencanaan tertentu, intruksi dan wewenang kepada bawahan kita. Prinsip lainnya adalah harus merefleksikan sifat-sifat kebutuhan dari aktivitas yang harus dievaluasi, dapat dengan segera melaporkan penyimpangan-penyimpangan, fleksibel dapat merefleksikan pada organisasi, ekonomis, dapat dimengerti dan dapat menjamin diadakannya tindakan korektif.

B. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut

2.1. Penelitian Terdahulu

No.	Nama, judul dan tahun penelitian	Metode	Teori yang digunakan	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Azmi Hamdi (2015) Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Di Kota Padang	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif	Teori Siagian (2008:46) tentang pengawasan, yaitu : 1. Penetapan standar 2. Memantau 3. Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan 4. Membandingkan 5. Pengambilan Tindakan Koreksi Bila Diperlukan	Hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa Pelaksanaan pengelolaan sampah di Kota Padang masih belum sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah. Agar pelaksanaan pengelolaan sampah di Kota Padang bisa	- Objek penelitian - Teori yang digunakan

				berjalan sesuai dengan peraturan maka perlu dilakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah. Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang masih belum optimal, sebab masih ditemukan kendala-kendala yang dapat menghambat terlaksananya pengawasan. Kendala-kendala yang dihadapi, yaitu Peraturan Daerah yang mengatur tentang pengelolaan sampah tidak menjelaskan pengawasan apa saja yang harus dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah di Kota Padang, kurangnya personil yang dimiliki dalam melakukan	
--	--	--	--	--	--

				pengawasan dan belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) mengenai pelaksanaan pengelolaan sampah di Kota Padang sehingga pengawasan belum dapat dilakukan secara optimal.	
2.	Agra Bahana (2016) Analisis Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Pedurungan Koa Semarang	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif.	Teori Sejati (2009:24) tentang Pengelolaan sampah, yaitu : 1. Input 2. Proses 3. Output	Dalam perencanaan pengelolaan sampah, UPT Wilayah 3 Kecamatan Pedurungan memiliki 14 jumlah TPS yang masing-masing pengelolaanya harus dilakukan pengangkutan sampah 1 ritasi hingga 2 ritasi, 1 truk mengampu dua Kecamatan dan pengangkutan dilakukan pada pagi hari hingga sore hari.	- Variabel penelitian - Objek penelitian - Teori yang digunakan
3.	Jayanti Nigiawan (2018) Manajemen Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Tembalang	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif.	Teori George Terry (Handoko, 2009 : 22) tentang fungsi-fungsi Manajemen yaitu : 1. Perencanaan 2. Pengorganisasian 3. Pengarahan 4. Pengawasan	Kegiatan manajemen pengelolaan sampah di Kecamatan Tembalang telah berhasil dilaksanakan dengan prosedur 3R (Reduce, Reuse, Recycle) melalui proses pemilahan sampah. Manajemen pengelolaan	- Variabel penelitian - Objek penelitian - Teori yang digunakan

				kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan baik pada proses planning, organizing, actuating, maupun controlling, namun begitu masih belum optimal, sehingga perlu dilakukan peningkatan di beberapa aspek, seperti penanganan berbagai kendala yang dihadapi dalam kegiatan pengelolaan sampah di Kecamatan Tembalang.	
4.	Lilin Arliyana (2017) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Di Kecamatan Sekolaq Darat Kabupaten Kutai Barat	Jenis penelitian ini diskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif.	Teori Pengelolaan sampah rumah tangga dilihat dari Undang-undang No. 18 Tahun 2008 : 1. Proses 2. Pengawasan 3. Pengolahan	Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengelolaan sampah rumah tangga di Kecamatan Sekolaq Darat telah diatur dalam Peraturan Daerah Kutai Barat Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah, namun secara implementatif belum mencapai hasil yang optimal.	- Variabel penelitian - Objek penelitian - Teori yang digunakan

Dari penjabaran penelitian terdahulu di atas maka dapat dijelaskan bahwa kesimpulannya dari pengawasan dan pengelolaan sampah belum optimal dan belum sesuai dengan peraturan yang berlaku di daerah penelitian masing-masing.

C. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan dari variabel penelitian **“Pelaksanaan tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Dalam Pengawasan Sampah Pasar Kayujati Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir”** kemudian diukur dengan acuan dari beberapa teori yang dijadikan indikator serta fenomena yang terjadi, maka penulis menjelaskan hubungan tersebut agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penafsiran makna dan maksud penelitian. Untuk lebih jelas, teori yang dijadikan indikator akan menampilkan pada gambar sebagai berikut:

Gambar II.1 Kerangka Pikiran Pelaksanaan tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam pengawasan sampah Pasar Kayujati Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir



Sumber : Data Modifikasi Penelitian, 2020

D. Konsep Operasional Variabel

Untuk menghindari pemahaman yang berbeda tentang konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini, maka dikemukakan konsep sebagai berikut :

1. Kebijakan merupakan apa yang dikatakan dan apa yang dilakukan oleh pemerintah atau apa yang tidak dilakukannya, ia adalah tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran dari program pelaksanaan niat dan peraturan-peraturan
2. Pengawasan dapat diartikan sebagai proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.
 - a. Tahap penetapan standar. Tujuannya adalah sebagai sasaran, kuota dan target pelaksanaan kegiatan yang digunakan sebagai patokan dalam pengambilan keputusan.
 - b. Tahap penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan. Digunakan sebagai dasar atas pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara tepat
 - c. Tahap pengukuran pelaksanaan kegiatan. Beberapa proses yang berulang-ulang dan kontinu yang berupa pengamatan, laporan, metode, pengujian dan sampel
 - d. Tahap perbandingan pelaksanaan dengan standard an analisa penyimpangan. Digunakan untuk mengetahui penyebab terjadinya penyimpangan dan menganalisisnya juga digunakan sebagai alat pengambilan keputusan
 - e. Tahap pengambilan tindakan koreksi. Bila diketahui dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan, dimaan perlu ada perbaikan dalam pelaksanaan.

E. Operasional Variabel

Untuk memudahkan arah penelitian ini yang terdiri dari satu variabel dengan empat indikator ini, maka dilakukan operasional variabel yang tertuang pada tabel berikut ini :

Tabel II.1 Konsep Operasional Variabel

Konsep	Variabel	Indikator	Item yang dinilai
1	2	3	4
Pengawasan merupakan fungsi manajerial yang keempat setelah perencanaan, pengorganisasian dan pengarahan (Feriyanto, 2015:63)	Pelaksanaan tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam pengawasan sampah Pasar Kayujati Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Tahap penetapan standar	1. Menertibkan pembuangan sampah 2. Melakukan pengecekan rutin 3. Menjaga keamanan dalam bekerja 4. Memberitahukan ketentuan pembuangan sampah
		Tahap penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan	1. Membuat catatan pengawasan. 2. Catatan pengawasan dilakukan setiap waktu 3. Mencatat wilayah parkir yang tidak memenuhi syarat 4. Mencatat permasalahan pengelolaan sampah yang bermasalah
		Tahap pengukuran pelaksanaan kegiatan	1. Melakukan evaluasi terhadap hasil pengawasan 2. Melakukan perbandingan pengawasan 3. Melakukan rencana pengawasan selanjutnya 4. Merealisasikan pengawasan
		Tahap perbandingan pelaksanaan dengan standar	1. Mengatasi permasalahan dalam pengelolaan sampah 2. Pengawas mengalami

		dan analisa penyimpangan	kesalahan 3. Menilai penyimpangan untuk menilai masalah pengelolaan sampah 4. Pengawasan mengalami penyimpangan
		Tahap pengambilan tindakan koreksi	1. Pelaksanaan pengawasan mencari kesalahan 2. Membersihkan wilayah pembuangan sampah 3. Mencari solusi permasalahan 4. Solusi permasalahan dilakukan bersama-sama

Sumber : Modifikasi Penelitian, 2020



BAB III

METODE PENELITIAN

Agar data-data bisa di dapatkan secara benar dan lengkap, maka penulis melakukan pengumpulan data serta metode-metode yang di gunakan oleh penulis dalam membahas hasil penelitian yang di buat oleh penulis adalah :

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam peneliitan ini yaitu deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan keadaan yang sebenarnya tentang apa yang terdapat pada saat penelitian yang berdasarkan pada pengamatan penulis dilapangan dengan cara mengumpulkan data, mengklarifikasikan dan menganalisa sehingga diperoleh rumusan analisa terhadap permasalahan yang dihadapi. Kemudian dengan metode penelitian kualitatif, metode ini berusaha memberikan suatu gambaran mengenai keadaan dilapangan sehingga metode ini bertujuan mengakumulasi data belaka sehingga diperoleh kesimpulan dari penelitian.

B. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang terjadi, maka penelitian ini dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir. Adapun alasan dipilihnya lokasi penelitian ini adalah karena Dinas ini merupakan badan yang melakukan pengawasan tempat pemrosesan akhir dengan sistem

pembuangan open dumping dan terdapat permasalahan terkait pengolahan sampah tersebut.

C. Informan dan Key Informan 32

Informan penelitian adalah ~~suatu~~ atau pihak yang mengetahui atau memberikan informasi maupun kelengkapan mengenai objek penelitian. Informan dalam penelitian ini yaitu :

1. Pengawas Kebersihan Pasar yaitu Bapak Mar Bujang
2. Tenaga Kebersihan Pasar yaitu Bapak Aceng
3. Pedagang pasar Kayujati yaitu Bapak Badrun, Ibu Siti dan Ibu Roniah

Adapun yang menjadi key informan dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir. Berikut dapat dilihat uraiannya :

Tabel III.1 Identitas Informan Penelitian

No.	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	H. Amir Husni, ST	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir	Key Informan
2.	Mar Bujang	Pengawas Kebersihan Pasar	Informan
3.	Aceng	Tenaga Kebersihan Pasar Kayujati Tembilahan Pekanbaru	Informan
4.	Bapak Badrun	Pedagang di Pasar Kayujati Tembilahan Pekanbaru	Informan
5.	Ibu Siti	Pedagang di Pasar Kayujati Tembilahan Pekanbaru	Informan
6.	Ibu Roniah	Pedagang di Pasar Kayujati Tembilahan Pekanbaru	Informan

D. Teknik Penentuan Informan dan Key Informan

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan informan penelitian melalui *key informan* dimana peneliti sudah memahami informasi awal tentang objek penelitian maupun informan penelitian dengan menggunakan *purposive sampling*. *Purposive sampling* menurut Djaman satori (2007;6) yaitu teknik pengambilan sampling yang ditetapkan dengan menyesuaikan pada tujuan atau pertimbangan tertentu.

E. Jenis dan Sumber Data

Guna memperoleh data yang dibutuhkan, maka penulis membagi kedalam dua bagian yaitu :

1. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber dilapangan melalui wawancara dengan mengajukan pertanyaan yang berkenaan dengan Pelaksanaan tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam pengawasan sampah Pasar Kayujati Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir
2. Data Sekunder yaitu data yang diambil dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir dengan melakukan kepustakaan riset meliputi :
 1. Gambaran umum Dinas
 2. Gambaran umum Pasar Kayujati

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini antara lain :

- 1. Observasi**

Yang penulis lakukan langsung melakukan survei ke tempat penelitian lokasi. Dengan melakukan observasi langsung di lapangan, penulis dapat mengetahui kejadian sebenarnya yang terjadi di lapangan. Observasi dilakukan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir sehingga dapat mengetahui permasalahan yang terjadi mengenai Pelaksanaan tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam pengawasan sampah Pasar Kayujati Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.

2. Wawancara

Pengumpulan jumlah-jumlah data yang dilakukan dengan cara memberikan peranyaan-pertanyaan langsung terhadap responden yang akan menerimanya sesuai dengan objek yang akan di teliti oleh penulis. Adapun wawancara dilakukan dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir.

3. Dokumentasi

Adalah data yang di kumpulkan melalui data-data yang di kutip dari sebuah catatan, seperti dokumentasi dan administrasi sesuai dengan masalah yang akan diteliti. Dengan begitu dokumentasi dapat di peroleh dengan melalui arsip-arsip/dokumen-dokumen pada lembaga yang ingin diteliti.

G. Teknik Analisis Data

Menurut Nazir (1999 : 149) “Analisis data adalah mengelompokkan, membuat suatu urutan, memanipulasi, serta menyingkirkan data sehingga mudah

untuk dibaca”. Dalam menganalisis data, data hasil dokumentasi dihubungkan dan dilengkapi dengan data hasil wawancara.

Setelah data berhasil dikumpulkan melalui teknik pengumpulan data diatas, maka peneliti akan mengelompokkan sesuai dengan jenis data. Kemudian data tersebut akan diolah dan dianalisis secara deskriptif, yaitu dengan menggambarkan dan memaparkan data yang berdasarkan kenyataan dilapangan dengan kondisi yang terjadi saat penelitian.

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



H. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian

Tabel III.2. Tabel jadwal waktu penelitian tentang Pelaksanaan tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam pengawasan sampah Pasar Kayujati Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu Tahun 2020																								Ket
		September				Oktober				November				Desember				Januari				Februari				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Persiapan dan penyusunan UP	x	x	x	x	X	x																			
2	Seminar UP							x	x	x	x															
3	Perbaikan UP											x	x													
4	Perbaikan daftar kuisisioner													x												
5	Pengurusan rekomendasi penelitian (riset)														x	x										
6	Penelitian Lapangan																x									
7	Penelitian dan analisis data																	x	x							
8	Penyusunan laporan Peneltian (Skripsi)																			x						
9	Konsultasi Perbaikan Skripsi																			x	x					
10	Ujian Skripsi																					x				
11	Refisi dan Pengesahan skripsi																						x	x		

[illegible]

BAB IV

GAMBARAN UMUM

A. Gambaran Umum Indragiri Hilir

Kabupaten Indragiri Hilir dengan Ibu Kota Tembilahan adalah sebuah daerah dengan perkebunan kelapa terluas di Indonesia bahkan di dunia yang terletak di bagian selatan Provinsi Riau. Daerah ini terkenal dengan julukan "Negeri Seribu Parit" karena daerah ini terdiri dari perairan, sungai, rawa-rawa, dan perkebunan kelapa yang dipisahkan oleh ribuan parit.

Secara geografis daerah ini berada pada $0^{\circ}36'$ LU, $1^{\circ}07'$ LS dan antara $102^{\circ}32'$ dan $104^{\circ}10'$ BT, dengan luas daerah 13.798,37 km², lautan 6,318 dan perairan umum 888,97 km² yang berbatasan dengan daerah sebagai berikut :

Utara : Kabupaten Tanjung Jabung, Provinsi Jambi

Selatan : Kabupaten Pelalawan

Barat : Kabupaten Indragiri Hulu

Timur : Kabupaten Kepulauan Kepri

Jumlah penduduk Kabupaten Indragiri Hilir mencapai 647.512 jiwa yang terdiri dari sejumlah suku/ etnik, seperti Banjar dari Kalimantan, Bugis dari Sulawesi, dan Melayu dari Jambi. Sementara ekonomi Kabupaten Indragiri Hilir

bersandar pada sektor perkebunan yang meliputi tanaman pangan, perkebunan, perikanan, dan kehutanan. Berdasarkan aktifitas bisnis/ sumber kehidupan, Kabupaten Indragiri Hilir terdiri dari 69.01% sektor pertanian, 8.58% pelayanan, 7.74% perdagangan, 1.54% industri dan yang lain-lain 1.54%. Luas areal untuk sektor pertanian adalah 38.181 Ha, sementara sektor perkebunan memiliki lahan seluas 607.708 Ha.

Kabupaten Indragiri Hilir memiliki iklim tropis basah, dengan curah hujan tertinggi 1.300 mm. Musim penghujan tiba pada bulan Oktober hingga Maret, dan musim kemarau tanpa hujan berlangsung selama 3 (tiga) bulan dan menimbulkan masalah dalam memperoleh air bersih , irigasi dan lain-lain. Arus angin sepanjang tahun merupakan angin utara dan angin selatan. Sepanjang musim angin utara, gelombang dan pasang relatif tinggi hingga mampu membawa air asin ke arah hulu sungai.

Secara umum kondisi tanah terdiri dari tanah gambut dan rawa-rawa yang sangat cocok untuk perkebunan kelapa hybrida, itulah sebabnya Kabupaten Indragiri Hilir berperan sebagai lumbung kelapa di Provinsi Riau bahkan di Indonesia. Posisi Indragiri Hilir yang strategis memainkan peranan penting untuk perkembangan daerah dimasa depan karena daerah ini didukung oleh 2 pelabuhan laut yang diperuntukkan bagi aktifitas ekspor lintas batas yaitu Pelabuhan Sungai Guntung dan Kuala Enok.

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mendukung kelancaran aktifitas dunia usaha, pemerintah daerah telah membangun beberapa fasilitas dan infrastruktur. Adapun fasilitas yang telah tersedia di daerah ini

merupakan; transportasi darat (dapat diakses oleh kendaraan roda 4), transportasi udara (Bandara Baru di Sungai Salak/ Tempuling, yang akan segera dioperasikan), transportasi laut (Pelabuhan), dibangun di 3 (tiga) lokasi: Kuala Enok, Sungai Guntung, dan Kuala Gaung. Jaringan listrik disuplai di 32 cabang dengan total kapasitas (49.986.196 KWH), Telekomunikasi (telepon kabel, telepon selular dan internet), Fasilitas Kesehatan (1 Rumah Sakit gawat darurat 24 jam & Puskesmas di setiap Kecamatan), suplai air bersih dikelola PDAM, kapasitas 125 l/detik di 7 Ibu Kota Kecamatan, dan fasilitas pendukung lainnya; Perbankan (Bank Nasional & Daerah), Akomodasi (Hotel & penginapan).

Indragiri Hilir terdiri dari daratan dan perairan yang beriklim tropis basah, curah hujan tertinggi 1300 mm, hujan turun antara bulan oktober sampai maret setiap tahunnya. Sedangkan musim kemarau kadang-kadang hujan tidak turun selama 3 (tiga) bulan lamanya. Komoditi unggulan Kabupaten Indragiri Hilir yaitu sektor Perkebunan dan jasa. Sub sektor perkebunan komoditi yang diunggulkan berupa kakao, kelapa sawit, Kopi, Kelapa dan karet. Pariwisatanya yaitu wisata alam, wisata adat dan budaya.

Sebagai penunjang kegiatan perekonomian, di Kabupaten ini tersedia 1 bandar udara, yaitu Bandara Dabo. Untuk transportasi laut tersedia 8 pelabuhan, antara lain Pelabuhan Tembilahan, Pelabuhan Kuala Enok, Pelabuhan Tanjung Batu Kundur, Pelabuhan Sungai Guntung, Pelabuhan Khusus PT. Bhumireksa Nusasejati, Pelabuhan Khusus PT. Multigambut Industri, Pelabuhan Khusus PT. Pulau Sambu Guntung, Dermaga CV. AE BROTHER'S COMPANY. Untuk

industri tersedia 1 kawasan industri, yaitu Kawasan Industri Kuala Elok, yang didukung juga oleh fasilitas listrik dan telekomunikasi.

B. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Indragiri Hilir merupakan satuan kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan, sasaran organisasi dan tata kerja dinas-dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 17 Tahun 2008 tentang susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir serta didukung pula oleh Keputusan Wali Kabupaten Indragiri Hilir tentang uraian Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pengelolaan Sampah, Kasi Pengurangan dan Pemanfaatan Sampah, Kasi Penanganan dan Pemrosesan Akhir Sampah, dan Kasi Sarana dan Prasarana.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir terdiri dari 1 sekretariat dan 4 bidang teknis yaitu Bidang Tata Lingkungan, Bidang Pengelolaan Sampah, Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Pengelolaan Limbah Beracun dan Berbahaya, serta Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.

Adapun visi dan misi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir adalah “Terwujudnya Kabupaten Indragiri Hilir sebagai Kota Terbersih, Hijau, Indah dan Gemerlap menuju Kota Metropolitan yang Madani”.Kemudian misi terdiri dari:

1. Menjadikan Kabupaten Indragiri Hilir sebagai Kota Terbersih
2. Menjadikan Kabupaten Indragiri Hilir sebagai Kota Hijau
3. Kabupaten Indragiri Hilir sebagai Kota yang Indah
4. Kabupaten Indragiri Hilir sebagai Kota yang Gemerlap
5. Kabupaten Indragiri Hilir sebagai Kota yang Madani
6. Kabupaten Indragiri Hilir sebagai Kota yang Metropolitan

Adapun susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum.
 2. Sub Bagian Keuangan.
 3. Sub Bagian Program.
- c. Bidang Tata Lingkungan, membawahi:
 1. Seksi Inventarisasi dan Perencanaan Lingkungan.
 2. Seksi Kajian dan Evaluasi Dampak Lingkungan.
 3. Seksi Konservasi, Perubahan Iklim dan Kemsakan Lingkungan.
- d. Bidang Pengelolaan Sampah, membawahi:

1. Seksi Pengurangan dan Pemanfaatan Sampah.
 2. Seksi Penanganan dan Pemrosesan Akhir Sampah.
 3. Seksi Sarana dan Prasarana.
- e. Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, membawahi:
1. Seksi Pemantauan Lingkungan.
 2. Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan.
 3. Seksi Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- f. Bidang Penataan dan Peningkatan[^] Kapasitas Lingkungan Hidup, membawahi:
1. Seksi Penegakan Hukum Lingkungan.
 2. Seksi Peningkatan Kapasitas, Informasi dan Komunikasi Lingkungan.
 3. Seksi Retribusi dan Penagihan.
- g. Unit Pelaksana Teknis (UPT).
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sedangkan jumlah pegawai yang ada pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir diluar dari jumlah tenaga harian lepas itu sendiri berjumlah 69 orang, hal ini dapat dilihat dari keterangan tabel dibawah ini:

Tabel. IV.3. Jumlah Pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir

NO	JABATAN	JUMLAH
1.	Kepala Dinas	1 orang
2.	Sekretaris	1 orang
3.	Kasubbag	3 orang
	Staf	10 orang

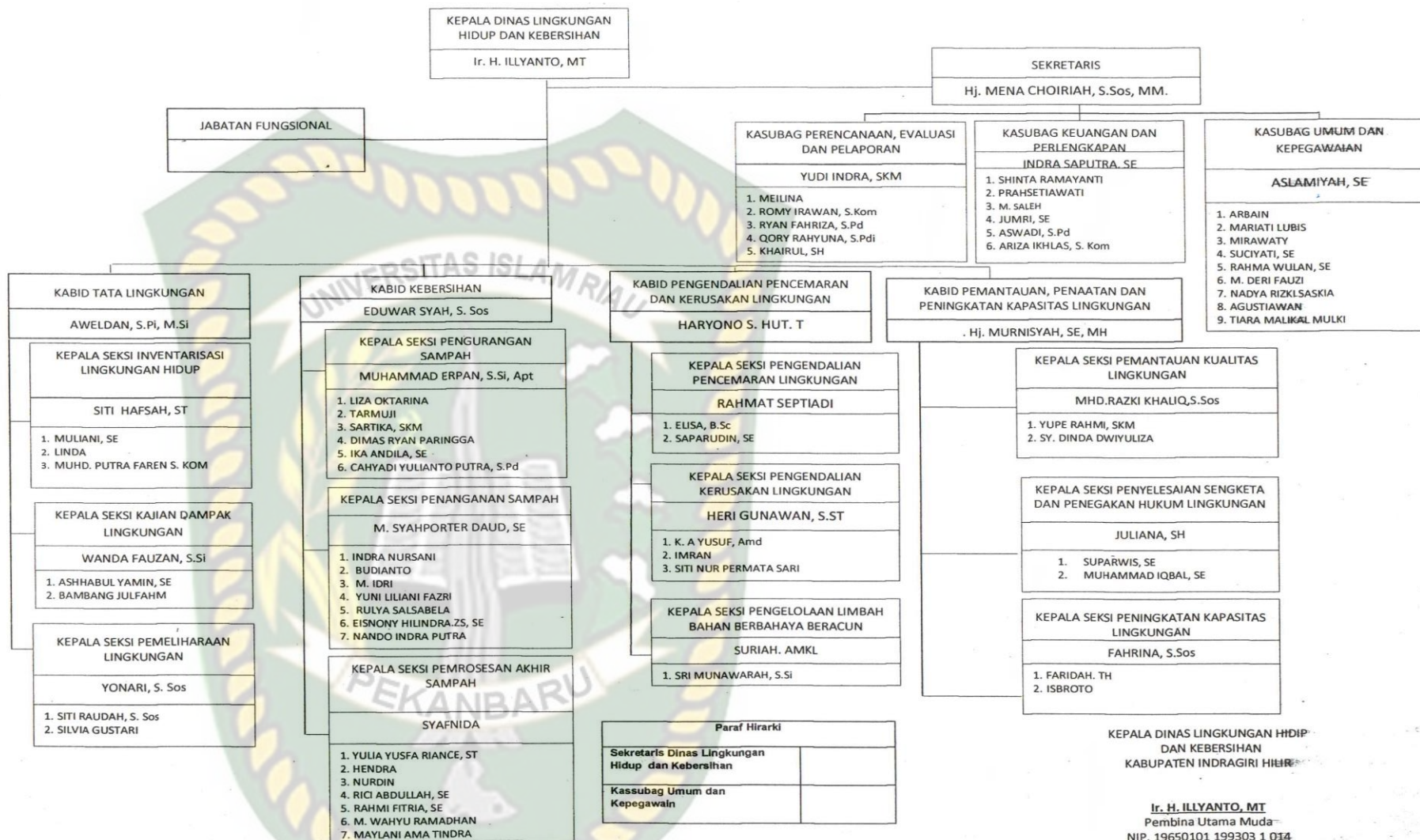
NO	JABATAN	JUMLAH
4.	Kepala Bidang Tata Lingkungan	1 orang
	Kepala Seksi	3 orang
	Staf	15 orang
5.	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah	1 orang
	Kepala Seksi	3 orang
	Staf	17 orang
6.	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Pengelolaan Limbah Beracun dan Berbahaya	1 orang
	Kepala Seksi	3 orang
	Staf	3 orang
7.	Kepala Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	1 orang
	Kepala Seksi	3 orang
	Staf	3 orang
JUMLAH		69 orang

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir, 2020

C. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir

Selanjutnya dalam sebuah organisasi manapun tentunya memiliki struktur sebagai susunan terhadap hirarki jabatan suatu organisasi, mengenai struktur Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar IV. 1 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir



Fungsi dan Tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir

1. Kepala Dinas

Tugas pokok Kepala Dinas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup, kebersihan dan sub urusan kehutanan serta tugas pembantuan lainnya. Adapun fungsi Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir, antara lain:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup dan kebersihan.
- b. perumusan rencana kerja, program dan kegiatan bidang lingkungan hidup dan kebersihan.
- c. pelaksanaan kegiatan yang menjadi tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan.
- d. perumusan kebijakan, penyusunan dan perencanaan teknis, pemberian bimbingan dan penyuluhan bidang lingkungan hidup dan kebersihan.
- e. penyelenggaraan pelayanan umum dan pelayanan teknis di bidang lingkungan hidup dan kebersihan.
- f. pelaksanaan urusan bidang kehutanan sub urusan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
- g. penetapan dan pengesahan naskah dinas sesuai dengan kewenangannya.
- h. pembinaan Unit Pelaksana Teknis dalam lingkup dinas.
- i. pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang lingkungan hidup dan kebersihan.

- j. pembinaan pegawai di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan.
- k. pengelolaan keuangan dinas.
- l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris

Tugas pokok sekretaris merencanakan, menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja Sekretariat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Fungsi sekretaris meliputi:

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan program dan anggaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir.
- b. perencanaan, penyusunan, perumusan dan pengoordinasian pelaksanaan program reformasi birokrasi.
- c. penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian, pengelolaan keuangan, penatausahaan aset dan perlengkapan serta penyusunan program.
- d. penyelenggaraan pelayanan dan pengaturan rapat dinas, upacara serta keprotokolan.
- e. pengoordinasian, pembinaan, perumusan laporan tahunan dan evaluasi setiap bidang sebagai pertanggungjawaban.
- f. pengoordinasian dan pembinaan pemeliharaan kebersihan, ketertib.an dan keamanan kantor dan lingkungannya, kendaraan dinas serta perlengkapan gedung kantor.

- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Sub Bagian Umum

Tugas pokok sub bagian umum adalah merencanakan, menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja Sub Bagian Umum berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan. Fungsi sub bagian umum meliputi:

- a. penyiapan bahan perumusan perlengkapan urusan tata usaha, rumah tangga serta kearsipan.
- b. pelaksanaan kegiatan, penghimpunan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan, dokumentasi serta pengolahan data dan informasi Sub Bagian Umum.
- c. pelaksanaan urusan keprptokolan, koordinasi dengan instansi terkait sesuai bidang tugasnya serta pelayanan hubungan masyarakat.
- d. pelaksanaan kegiatan pelayanan ruang pimpinan, tamu pimpinan, upacara-upacara dan rapat-rapat dinas,
- e. pengelolaan perjalanan dinas dan operasional rumah tangga dinas.
- f. pelaksanaan urusan pengelolaan barang milik daerah meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran, penggunaan, pemanfaatan dan pengamanan serta pemeliharaan Barang Milik Daerah (EMD),
- g. pelaksanaan kegiatan kebersihan, ketertiban, kenyamanan ruangan dan halaman kantor, disiplin pegawai serta pengamanan di lingkungan dinas.

- h. perumusan dan pelaksanaan pengolahan data pegawai, formasi pegawai, mutasi pegawai, penyusunan Daftar Unit Kepangkatan (DUK) dan registrasi ASN serta pengarsipan penilaian prestasi kerja ASN di lingkungan dinas.
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Sub Bagian Keuangan

Tugas pokok sub bagian keuangan adalah merencanakan dan melaksanakan program kerja Sub Bagian Keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Fungsi sub bagian keuangan meliputi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan penatausahaan aset berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. pelaksanaan verifikasi serta penelitian kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
- c. pelaksanaan penyiapan Surat Perintah Membayar (SPM).
- d. pelaksanaan verifikasi harian atas penerimaan.
- e. pelaksanaan verifikasi laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.
- f. penyiapan dan pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan dinas.
- g. pelaksanaan penatausahaan aset meliputi pembukuan, inventerisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- h. pelaksanaan penyimpanan terhadap dokumen dan bukti kepemilikan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya,

5. Sub Bagian Program

Tugas pokok sub bagian program adalah merencanakan dan melaksanakan program kerja Sub Bagian Program berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Fungsi sub bagian program meliputi:

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja serta perumusan Rencana Kerja Tahunan (RKT), penetapan kinerja, Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), laporan realisasi fisik program pembangunan, laporan tahunan dan laporan evaluasi kinerja.
- b. pengumpulan data dan informasi untuk pengembangan dan kebutuhan sarana dan prasarana.
- c. perumusan dan pelaksanaan pengendalian dan pelaporan.
- d. perumusan, pelaksanaan dan penghimpunan petunjuk teknis yang berhubungan dengan penyusunan program.
- e. pelaksanaan fasilitasi pengadaan barang dan jasa.
- f. pelaksanaan fasilitasi dan penyusunan tindak lanjut laporan masyarakat, temuan pemeriksaan fungsional dan pengawasan lainnya.
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Bidang Tata Lingkungan

Tugas pokok bidang tata lingkungan membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan tata lingkungan. Fungsi bidang tata lingkungan meliputi:

- a. pelaksanaan inventarisasi data dan informasi sumber daya alam.
- b. pelaksanaan penyusunan, pemantauan, evaluasi dan sinkronisasi pemuatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) tingkat Kota dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota.
- c. pelaksanaan koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan,
- d. pelaksanaan sinkronisasi RPPLH tingkat Kota berdasarkan RPPLH provinsi dan ekoregion.
- e. pelaksanaan penyusunan, pengesahan, pemantauan dan evaluasi kajian lingkungan hidup strategis.
- f. pelaksanaan penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup, neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup, status lingkungan hidup daerah dan indeks kualitas lingkungan hidup.
- g. pelaksanaan koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- h. pelaksanaan penilaian, pemeriksaan dan evaluasi dokumen lingkungan hidup dan penyelenggaraan kesekretariatan komisi penilai amdal.
- i. perumusan dan evaluasi pelaksanaan proses izin lingkungan.

- j. perumusan pelaksanaan konservasi dan pencadangan sumber daya alam, upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dan inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK),
- k. pelaksanaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya melalui pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) dalam satu daerah Kota.
- 1. perumusan bahan kebijakan, pelaksanaan, pemantauan dan pengawasan, pemanfaatan berkelanjutan dan koordinasi penyelesaian konflik dalam pemanfaatan dan konservasi keanekaragaman hayati.
- m. pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati.
- n. pelaksanaan pemantauan, penanggulangan dan pemulihan kerusakan lingkungan
- o. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Tata Lingkungan terdiri dari:

- a). Seksi Inventarisasi dan Perencanaan Lingkungan
- b). Seksi Kajian dan Evaluasi Dampak Lingkungan
- c). Seksi Konservasi, Perubahan Iklim dan Kerusakan Lingkungan

7. Bidang Pengelolaan Sampah

Tugas pokok bidang pengelolaan sampah adalah membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan pengelolaan sampah. Fungsi bidang pengelolaan sampah meliputi:

- a. perumusan kebijakan dan penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kota,
- b. perumusan dan penetapan target pengurangan sampah.
- c. perumusan kebijakan pengurangan dan pemanfaatan sampah.
- d. pembinaan pembatasan timbunan sampah, penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam, pendaurulangan sampah dan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk.
- e. perumusan kebijakan penanganan dan pemrosesan akhir sampah tingkat kota.
- f. pelaksanaan koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah.
- g. pelaksanaan penetapan lokasi Tempat Penampungan Sementara (TPS), Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah.
- h. pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping,
- i. perumusan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah.
- j. perumusan pembenan kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah.
- k. pelaksanaan kerja sama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah.

1. pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah.
- m. perumusan kebijakan dan penyelenggaraan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta.
- n. perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha).
- q. pelaksanaan perencanaan, penyediaan dan pemeliharaan fasilitas pendaurulangan sampah dan sarana prasarana penanganan sampah.
- p. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengelolaan Sampah terdiri dari :

- a). Seksi Pengurangan dan Pemanfaatan Sampah
- b). Seksi Penanganan dan Pemrosesan Akhir Sampah
- c). Seksi Sarana dan Prasarana

8. Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Tugas pokok Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun adalah membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan pengendalian pencemaran lingkungan dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun. Fungsi Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun meliputi:

- a. perumusan dan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- b. pelaksanaan koordinasi pengendalian pencemaran lingkungan dan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun dengan instansi terkait
- c. pelaksanaan pemantauan kualitas lingkungan (air, udara dan tanah).
- d. pelaksanaan penyiapan sarana prasarana pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan).
- e. pelaksanaan pemantauan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran sumber pencemar institusi dan non institusi.
- f. pelaksanaan Sosialisasi baku mutu lingkungan (air, udara dan tanah) dan baku mutu sumber pencemar.
- g. pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberiaa peringatan akan pencemaran lingkungan hidup kepada masyarakat.
- h. pelaksanaan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi.
- i. perumusan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara, pengumpulan dan pengangkutan bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun dalam satu daerah kota.
- j. pelaksanaan perizinan pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun menggunakan alat angkut roda 3 (tiga), penimbunan limbah

bahan berbahaya dan beracun dan penguburan limbah bahan berbahaya dan beracun medis yang dilakukan dalam satu daerah kota.

- k. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara, pengumpulan dan pengangkutan, pengolahan, pemanfaatan dan penimbunan bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun dalam satu daerah kota,
- 1. pelaksanaan bimbingan teknis pengendalian pencemaran air, udara dan tanah serta limbah bahan berbahaya dan beracun kepada usaha/kegiatan.
- m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya,

Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Pengelolaan Limbah

Bahan Berbahaya dan Beracun terdiri dari:

- a). Seksi Pemantauan Lingkungan
- b). Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan
- c). Seksi Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

9. Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Tugas pokok Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup adalah membantu sebagian tugas Kupaia Dinas dalam melaksanakan sub urusan pnaatan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup. Fungsi Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup meliputi:

- a. perumusan kebijakan dan penyelenggaraan pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat
- b. pelaksanaan penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan.
- c. pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,
- d. perumusan kebijakan serta pelaksanaan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- e. pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pengawas lingkungan hidup daerah
- f. perumusan pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum dan penyelenggaraan penegakan hukum lingkungan dan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup.
- g. perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengakuan keberadaan dan peningkatan kapasitas Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan local atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- h. pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup.

- i. pengembangan dan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup.
 - j. pengembangan dan penyelenggaraan penilaian dan pemberian penghargaan lingkungan hidup.
 - k. pengembangan sistem informasi lingkungan dan komunikasi lingkungan.
 - 1. perumusan kebijakan dan pelaksanaan pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah.
 - m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya,
- Bidang Petaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup terdiri dari
- a). Seksi Penegakan Hukum Lingkungan
 - b). Seksi Peningkatan Kapasitas, Informasi dan Komunikasi Lingkungan
 - c). Seksi Retribusi dan Penagihan

D. Sumber Daya Organisasi

Sumber daya organisasi secara umum dapat dikatakan manusia, dana dan peralatan untuk mendukung pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai dalam organisasi, begitu juga Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir sebagai sebuah organisasi pemerintah memiliki sumber daya organisasi yang salah satunya ialah Manusia, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel. IV.5. Data Sumber Daya Manusia Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir

No	Jabatan	Jumlah
1.	Kepala Dinas	1
2.	Setataris	1
3.	Subbagian	3
4.	Kepala Bidang	4
5.	Kepala Seksi	12
6.	Staf	48
Jumlah		69

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir, 2020

Dari tabel diatas terlihat bahwa jumlah pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir dapat dikatakan cukup memadai dari segi jumlah. Kemudian untuk mendukung pengelolaan sampah di Kabupaten Indragiri Hilir maka Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir memiliki 678 Tenaga Harian Lepas untuk operasional dilapangan, kemudian untuk melihat sarana dan prasarana pendukung pengelolaan sampah dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel. IV.6. Data Sumber Daya Perlengkapan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir

No	Jenis Kendaraan	Jumlah
1.	Pick Up	17
2.	Dump Truck	49
3.	Fuso	2
4.	Sweeper Road	1
Jumlah		69

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir, 2020

Jika dilihat dari perlengkapan yaitu kendaraan operasional yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir dari segi jumlah dapat dikatakan belum memadai dikarenakan berdasarkan Peraturan Daerah seharusnya dengan luasnya wilayah Kabupaten Indragiri Hilir memiliki 123 Unit kendaraan operasional dan juga banyak kondisi armada yang sudah tua, maka harus diadakan penggantian dan penambahan armada oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir untuk lebih mengefisienkan dan mengefektifitaskan pengelolaan sampah di Kabupaten Indragiri Hilir.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Informan

Deskripsi identitas informan merupakan identitas informan yang memberikan interpretasi terhadap obyektivitas dari penelitian mengenai Pelaksanaan Tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Dalam Pengawasan Sampah Pasar Kayujati Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir. Deskripsi identitas informan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel V.1 Identitas Informan Penelitian

No.	Nama	Jenis Kelamin	Umur	Jabatan
1.	Ir. H. Ilyanto, MT	Laki-laki	42 Tahun	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir
2.	Mar Bujang	Laki-laki	39 Tahun	Pengawas Kebersihan Pasar
3.	Aceng	Laki-laki	30 Tahun	Tenaga Kebersihan Pasar Kayujati Tembilahan Pekanbaru
4.	Bapak Badrun	Laki-laki	30 Tahun	Pedagang di Pasar Kayujati Tembilahan Pekanbaru
5.	Ibu Siti	Perempuan	41 Tahun	Pedagang di Pasar Kayujati Tembilahan Pekanbaru
6.	Ibu Roniah	Perempuan	45 Tahun	Pedagang di Pasar Kayujati Tembilahan Pekanbaru

Sumber : Olahan Data Penulis dari Hasil Wawancara, 2021

Dari data identitas informan tersebut diketahui informan yang diambil dalam penelitian ini terdiri dari 4 orang yang peneliti ketahui khusus menangani proses pengawasan sampah di Pasar Kayujati Tembilahan. Dengan informan yang digunakan ini peneliti memperoleh informasi terkait penelitian yang dilakukan sehingga dapat memperoleh hasil yang sebagaimana diharapkan.

B. Hasil Penelitian Pelaksanaan Tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Dalam Pengawasan Sampah Pasar Kayujati Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir

Menurut Undang-undang RI No 18 Tentang Pengelolaan Sampah Pasal 1 sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/proses alam yang berbentuk padat. Undang-Undang tersebut bertujuan agar pengelolaan sampah dapat memberikan manfaat secara ekonomi (sampah sebagai sumber daya), sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat. Selain itu, tujuan dari undang-undang tersebut adalah mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh sampah terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan. Pola konsumsi masyarakat memberikan kontribusi dalam menimbulkan jenis sampah yang semakin beragam, antara lain, sampah kemasan yang berbahaya dan sulit diurai oleh proses alam. Selama ini sebagian besar masyarakat masih memandang sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna, bukan sebagai sumber daya yang perlu dimanfaatkan. Masyarakat dalam mengelola sampah masih bertumpu pada pendekatan akhir (*end-of-pipe*), yaitu sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke tempat pemrosesan akhir sampah, padahal timbunan sampah dengan volume yang besar di tempat pemrosesan akhir sampah berpotensi melepas gas metan (CH_4) yang dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca dan memberikan kontribusi terhadap pemanasan global.

Pekanbaru merupakan ibukota provinsi Riau, sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, perindustrian dan perdagangan, dengan perannya yang cukup besar Kabupaten Indragiri Hilir berusaha menjadi dirinya sebagai kota yang siap

menerima segala konsekuensi pertumbuhan yang tercipta. Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Indragiri Hilir juga disebabkan oleh imigrasi yaitu bertambahnya jumlah penduduk yang datang dari luar ke dalam dimana salah satu faktornya adalah untuk mencari pekerjaan, pendidikan, dan dapat kita prediksi akan muncul permasalahan baru yang dihadapi Kabupaten Indragiri Hilir salah satunya permasalahan kebersihan ataupun sampah. Sampah menurut Perda Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 4 tahun 2000 Tentang Retribusi Sampah BAB I Pasal satu adalah segala barang/benda atau bahan yang telah berubah baik warna atau bentuk maupun ukuran akibat telah dipakai/dimanfaatkan atau segala benda, barang/bahan yang tidak dapat digunakan dan atau dipelihara secara patut. Pengertian tersebut menjelaskan bahwa sampah adalah benda/barang yang sudah tidak bernilai dan berguna dalam upaya pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, oleh karena itu jumlah sampah akan terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk di Kabupaten Indragiri Hilir.

Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir harus menyadari bahwa permasalahan sampah telah menjadi permasalahan nasional perlu adanya sistem pengelolaan yang dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir. Selain itu, bahwa dalam pengelolaan sampah di perlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan pemerintah daerah serta peran masyarakat dan dunia usaha sehingga perlu adanya undang-undang yang mengatur tentang pengelolaan sampah secara spesifik.

Berikut dapat dilihat hasil tanggapan responden mengenai Pelaksanaan Tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Dalam Pengawasan Sampah Pasar Kayujati Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir:

B.1. Penetapan Standar

Menentukan standar merupakan ketentuan standar dalam pelaksanaan pengawasan terhadap permasalahan persampahan yang menjadi ukuran dan pola untuk pelaksanaan pengawasan untuk ketenangan masyarakat secara jelas, logis, wajar, dan objektif. Standar kedudukan pada setiap strategi yang digunakan dalam pelaksanaan pengawasan secara teori pada suatu pekerjaan merencanakan tujuan kepastian dalam sasaran-sasaran hasil serta harapan yang dicapai. Pengawasan merupakan proses untuk menentukan sesuatu yang harus diraih ialah standar, apa yang dikerjakan adalah pelaksanaan, dan apabila butuh dilakukan perubahan agar pelaksanaan dijalani sesuai dengan perencanaan, yaitu selaras dengan panduan.

Standar yang ditetapkan antara lain yaitu pembuangan sampah yang teraur dan sesuai tempatnya serta pengolahan sampah secara optimal dan dikelola dijadikan pupuk kompos atau daur ulang sampah. Permasalahan yang terjadi yaitu dalam penyimpanan sampah ini tidak dilakukan secara maksimal, hal ini dapat dilihat dari beberapa tempat penampungan sampah yang selalu tidak dalam keadaan bersih bahkan tidak dibersihkan. Hal ini dapat terjadi karena terlambatnya atau tidak bekerjanya petugas kebersihan sampah setiap harinya, sehingga dari hal tersebut dapat menimbulkan bau yang tidak enak.

Padahal masyarakat mengaku membayar retribusi persampahan/kebersihan di Kabupaten Indragiri Hilir responden sudah tepat pada waktunya dan sesuai

dengan tariff yang ditentukan pihak Seksi Penanganan Dan Pemrosesan Akhir Sampah, tetapi dampak dari pembayaran retribusi persampahan/kebersihan tersebut tidak pada pembangunan lingkungan rumah tangga yang terjadi sampai pada saat ini. Responden masih bertanggung sarana dan prasarana yang tersedia khususnya pada Lingkungan rumah tangga masih perlu perhatian besar, misalnya seperti bangunan kios-kios pada lingkungan rumah tangga yang jumlahnya minim sehingga masih banyak masyarakat lingkungan rumah tangga yang berjualan dipinggir-pinggir atau emperan lingkungan rumah tangga. Kemudian mengenai penentuan tarif serta prosedur atau syarat mengenai retribusi persampahan/kebersihan lainnya juga kurang dimengerti masyarakat karena tidak ada penjelasan khusus dari pihak Seksi Penanganan Dan Pemrosesan Akhir Sampah. Sehingga sering terjadi pertanyaan besar bagi responden dalam melakukan pembayaran retribusi persampahan/kebersihan.

Menurut Undang-undang RI No 18 Tentang Pengelolaan Sampah Pasal 1 sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/proses alam yang berbentuk padat. Undang-Undang tersebut bertujuan agar pengelolaan sampah dapat memberikan manfaat secara ekonomi (sampah sebagai sumber daya), sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat. Selain itu, tujuan dari undang-undang tersebut adalah mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh sampah terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara kepada Bapak Ilyanto sebagai Kepala Seksi Penanganan Dan Pemrosesan Akhir Sampah Pada tanggal 11

Februari 2021, dengan pertanyaan bagaimana penetapan standar dalam pengelolaan sampah yang menyatakan :

“sebagai pihak yang menyelenggarakan pengelolaan sampah dan mengawasi smapah maka kami telah menetapkan standar sesuai dengan penetapan program yang akan dilakukan setiap tahunnya dan kami bekerja sama dengan pegawai lainnya serta tenaga kebersihan untuk mewujudkan kebersihan pasar serta sampah hingga dapat mengelola sampah tersebut sesuai dengan standar yang telah ditetapkan”.

Sementara hasil dari wawancara dengan Bapak Aceng sebagai Mandor Pasar Kayujati Tembilahan Pekanbaru pada tanggal 11 Februari 2021 dengan pertanyaan bagaimana penetapan standar dalam pengelolaan sampah diketahui bahwa:

“kalau masalah pengangkutan sampah menurut saya sudah dilakukan dengan optimal karena armada sudah banyak yang mengangkut sampah dan bukan dari dinas saja tapi juga dari dua perusahaan pengangkutan sampah lainnya yang sangat membantu, akan tetapi kita terkendala oleh kurangnya kesadaran masyarakat atau pedagang pasar yang tidak dapat membantu untuk menjaga kebersihan pasar sehingga sampah baik hasil jualan dan belanja mereka buang sembarangan. Padahal kami juga sudah menyediakan beberapa keranjang sampah disekitar tempat mereka berjualan tapi ya itulah mereka berpikiran ya sudah bayar iuran sampah jadi kebersihan sampah ya menjadi urusan kita”.

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan Bapak Edian Ady sebagai Operator Timbangan di Pasar Kayujati Tembilahan Pekanbaru pada tanggal 11 Februari 2021 dengan pertanyaan bagaimana penetapan standar dalam pengelolaan sampah diketahui bahwa :

“Sistem pengumpulan sampah yang ada di Pasar Kayujati Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir ini dilakukan oleh pengelola Pasar Kayujati sendiri yang dilakukan hanya sekali dalam sehari yaitu pada siang hari. Sistem pengumpulan dan penyimpanan sampah sementara di pasar ini belum terlaksana secara maksimal karena fasilitas TPS yang tidak mencukupi dan sulit dijangkau yang menyulitkan pedagang membuang sampah di TPS, sehingga sampah yang ada dikumpulkan dan ditumpuk ke

tepi parit yang tidak jauh dari lokasi pasar tanpa dilakukan pemilahan terlebih dahulu.”.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara kepada Bapak Mar Bujang sebagai Pengawas Pasar Kayujati Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Pada tanggal 15 Februari 2021 dengan pertanyaan bagaimana penetapan standar dalam pengelolaan sampah, yang menyatakan bahwa :

“standar pembuangan sampah disini ya seperti itu saja, datang ke TPA membuang sampah pada lokasi yang ditentukan lalu dilakukan penyemprotan bakteri dan mengambil kertas hasil timbangan sebagai bukti telah melakukan pembuangan pada TPA ini”.

Kebijakan program persampahan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21 Tahun 2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan. Yaitu kebijakan peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas sistem pengelolaan. Tingkat pelayanan yang 40% pada saat ini menyebabkan banyak dijumpai TPS yang tidak terangkut dan masyarakat yang membuang sampah ke lahan kosong/sungai. Banyak anggota masyarakat yang tidak mendapatkan pelayanan pengumpulan sampah secara memadai. Sementara itu berbagai komitmen internasional sudah disepakati untuk mendorong peningkatan pelayanan yang lebih tinggi kepada masyarakat. Sasaran peningkatan pelayanan nasional pada tahun 2015 yang mengarah pada pencapaian 70% penduduk juga telah ditetapkan bersama. Untuk operasionalisasi kebijakan tersebut maka beberapa strategi ditetapkan yaitu :

Strategi (1) : Optimalisasi pemanfaatan prasarana dan sarana persampahan. Rendahnya tingkat pelayanan pengumpulan sampah sering diakibatkan oleh rendahnya tingkat pemanfaatan armada pengangkut. Banyak kota masih

mengoperasikan truck sampah dengan ritasi tidak efisien (tidak lebih dari 2 rit / hari). Sehingga diperlukan upaya untuk meningkatkan ritasi kendaraan pengangkut dan peralatan lainnya sehingga lebih banyak sampah terangkut dan lebih banyak masyarakat dapat terlayani.

Rencana tindak yang diperlukan adalah :

- Pelaksanaan evaluasi kinerja prasarana dan sarana persampahan
- Penyusunan pedoman manajemen asset persampahan

Strategi (2) : Meningkatkan cakupan pelayanan secara terencana dan berkeadilan. Pelayanan juga diharapkan dapat disediakan dengan jangkauan yang memberikan rasa keadilan. Disamping pusat kota yang mendapat prioritas, pelayanan juga tetap harus disediakan bagi masyarakat kelas ekonomi rendah agar mereka juga dapat menikmati lingkungan permukiman yang bersih dan sehat. Perluasan jangkauan pelayanan juga harus dilakukan secara terencana dan terprogram dengan baik dengan mempertimbangkan kebutuhan dan ketersediaan sumber daya.

Strategi (3) : Meningkatkan kapasitas sarana persampahan sesuai sasaran Pelayanan. Dalam batas pemanfaatan optimal telah tercapai dan masih dibutuhkan peningkatan cakupan pelayanan maka akan diperlukan adanya peningkatan kapasitas sarana persampahan khususnya armada pengangkutan.

Rencana tindak yang diperlukan adalah penambahan sarana persampahan khususnya armada pengangkut sampah sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan.

Strategi (4) : Melaksanakan rehabilitasi TPA yang mencemari lingkungan. Pengelolaan TPA yang buruk di banyak kota harus diakhiri dengan upaya peningkatan pengelolaan sesuai ketentuan teknis yang berlaku. TPA yang jelas-jelas telah menimbulkan masalah bagi lingkungan sekitarnya perlu segera mendapatkan langkah-langkah rehabilitasi agar permasalahan lingkungan yang terjadi dapat diminimalkan.

Rencana tindak yang diperlukan adalah pelaksanaan rehabilitasi TPA yang mencemari lingkungan sesuai dengan prioritas.

Strategi (5) : Meningkatkan kualitas pengelolaan TPA ke arah sanitary landfill. Serta TPA yang masih dioperasikan dengan jangka waktu relatif lama perlu segera dilakukan upaya peningkatan fasilitas dan pengelolaan mengarah pada metode *sanitary landfill* dan *controlled landfill* agar tidak menimbulkan masalah lingkungan di kemudian hari.

Rencana tindak yang diperlukan adalah penyusunan pedoman peningkatan pengelolaan TPA yang sangat diperlukan oleh daerah untuk perbaikan fasilitas persampahan yang dimiliki.

Strategi (6) : Meningkatkan Pengelolaan TPA Regional. Kota-kota besar pada umumnya mengalami masalah dengan lokasi TPA yang semakin terbatas dan sulit diperoleh. Kerjasama pengelolaan TPA dengan kota/kabupaten lainnya akan sangat membantu penyelesaian masalah dengan mempertimbangkan solusi yang saling menguntungkan.

Rencana tindak yang diperlukan adalah : Penyusunan studi lokasi dan kelayakan pengembangan TPA regional sesuai Tata Ruang dan Uji coba pengelolaan TPA regional secara professional.

Strategi (7) : Penelitian, pengembangan, dan aplikasi teknologi penanganan persampahan tepat guna dan berwawasan lingkungan. Kekeliruan dalam pemilihan teknologi seperti insinerator tungku yang banyak dilakukan oleh Pemerintah Daerah perlu segera dihentikan dengan memberikan pemahaman akan kriteria teknisnya. Disamping itu juga sangat diperlukan aktivitas penelitian dan pengembangan untuk mendapatkan teknologi yang paling sesuai dengan kondisi sampah di Indonesia pada umumnya.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara kepada Bapak Ilyanto sebagai Kepala Seksi Penanganan Dan Pemrosesan Akhir Sampah Pada tanggal 11 Februari 2021, dengan pertanyaan apakah sudah melakukan pengecekan rutin pembuangan sampah dalam pengelolaan sampah yang menyatakan :

“bentuk partisipasi pedagang dalam membuang sampah di tempat yang disediakan pengelola mempunyai kecenderungan yang rendah. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan jumlah tempat sampah yang disediakan dan juga sulit dijangkau, sehingga mereka cenderung hanya mengumpulkan saja ditempat mereka berdagang kemudian dibersihkan juga ditumpuk begitu saja disatu wadah oleh pengelola pasar. Hal ini disebabkan karena para pedagang sudah membayar uang retribusi kebersihan tiap harinya, sehingga mereka beranggapan masalah kebersihan merupakan urusan pengelola.”

Sementara hasil dari wawancara dengan salah satu pedagang Pasar Kayujati Tembilahan Pekanbaru pada tanggal 11 Februari 2021 dengan pertanyaan apakah sudah melakukan pengecekan rutin pembuangan sampah dalam pengelolaan sampah diketahui bahwa:

“pengumpulan sampah pasar kayujati belum terlaksana dengan baik dikarenakan masih tercampurnya sampah basah dan sampah kering yang ditumpuk dalam satu wadah dan dibiarkan begitu saja di tepi parit. Hal ini terjadi karena kurang memadainya tempat penampungan sementara untuk sampah organik dan anorganik sehingga menyulitkan warga untuk membuang sampah pada tempatnya. Namun ada pula faktor kebiasaan masyarakat yang tidak peduli akan dampak kesehatan yang terjadi apabila pengumpulan sampah tidak dilaksanakan dengan baik”.

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan Bapak Edian Ady sebagai Operator Timbangan di Pasar Kayujati Tembilahan Pekanbaru pada tanggal 11 Februari 2021 dengan pertanyaan apakah sudah melakukan pengecekan rutin pembuangan sampah dalam pengelolaan sampah diketahui bahwa :

“saya yang bertugas melakukan pengangkutan sampah secara rutin, Cuma itu lah yang menjadi masalah juga daya tampung hasil pengangkutan yang tidak seimbang daya angkut armada yang membawa sampah ke TPA oleh karena itu mesti bolak balik lagi, sementara sampah semakin banyak dan menumpuk”.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara kepada Bapak Mar Bujang sebagai Pengawas Pasar Kayujati Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Pada tanggal 15 Februari 2021 dengan pertanyaan apakah sudah melakukan pengecekan rutin pembuangan sampah dalam pengelolaan sampah, yang menyatakan bahwa :

“peran pengelola pasar sangatlah penting untuk melakukan pengumpulan sampah dengan benar dan menyediakan tempat penampungan sementara khusus sampah organik dan sampah anorganik. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan juga perlu untuk memberikan sosialisasi tentang dampak membuang sampah sembarangan apalagi sampah yang tidak dipilah terlebih dahulu. Sampah organik lebih cepat membusuk sehingga memerlukan pengelolaan yang cepat, baik dalam pengumpulan maupun dalam pembuangannya. Pembusukan ini akan menghasilkan zat yang bersifat racun bagi tubuh.”.

Kemudian hasil observasi yaitu biasanya para pedagang membayar uang lapak kepada pengelola pasar dan membayar uang keamanan. Pasar Kayujati adalah pasar yang beroperasi setiap hari, jenis dagangan yang dijual di Pasar Kayujati

adalah kebutuhan sehari-hari seperti sayur-sayuran, daging, sembako, peralatan rumah tangga, juga menjual pakaian bekas. Sampah yang dihasilkan Pasar Kayujati kebanyakan sampah organik dan juga anorganik. Menurut survei langsung ke Pasar Kayujati sampah organik dan anorganik berserakan begitu saja di tepi pasar yang jaraknya tidak jauh. Sampah ditumpuk di tepi parit tepatnya dibawah jembatan dengan tidak dipilah terlebih dahulu. Banyak juga sampah berserakan di sudut-sudut pasar dan juga di gorong-gorong, dan ketersediaan tempat pembuangan sementara (TPS) yang minim dan jauh dari lokasi pasar, yang menyulitkan pedagang membuang sampah sehingga sampah yang ada ditumpukkan di tepi parit dan di tepi jalan pasar. Banyaknya orang yang ada di pasar membuang sampah sembarangan membuat lingkungan pasar menjadi tidak nyaman. Tentunya hal ini akan merusak ekosistem pasar. penampungan sampah setiap harinya harus dilakukan secara rutin agar penyimpanan sampah ke Pasar Kayujati Tembilahan dapat dilakukan secara optimal. Apabila penyimpanan ini dilakukan tidak secara optimal maka akan berdampak pada kebersihan kota yang tidak rapi dan menimbulkan bau yang tidak enak. Disini petugas kebersihan sangat berperan penting sehingga Kabupaten Indragiri Hilir dapat menjadi kota yang bersih dan nyaman. Berikut dapat dilihat rekap hasil observasi penulis :

Tabel 5.1. Hasil Rekap Observasi Terkait Indikator Tahap Penetapan Standar

No.	Uraian	Keterangan
1.	Bentuk pengamatan	Pengawasan pengangkutan sampah di pasar Kayu Jati
2.	Waktu kegiatan	Pengawas Pengawas Kebersihan Pasar dan tenaga kerja pengangkut sampah
3.	Tempat pengamatan	Pasar Kayu Jati
4.	Aktor yang terlibat	Hari Senin tanggal 15 Februari 2021
5.	Hasil observasi	Sistem pengumpulan sampah yang ada di

		Pasar Kayujati Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir ini dilakukan oleh pengelola Pasar Kayujati sendiri yang dilakukan hanya sekali dalam sehari yaitu pada siang hari. Sistem pengumpulan dan penyimpanan sampah sementara di pasar ini belum terlaksana secara maksimal karena fasilitas TPS yang tidak mencukupi dan sulit dijangkau yang menyulitkan pedagang membuang sampah di TPS, sehingga sampah yang ada dikumpulkan dan ditumpuk ke tepi parit yang tidak jauh dari lokasi pasar tanpa dilakukan pemilahan terlebih dahulu
--	--	---

Sumber : Hasil Observasi

B.2. Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan

Pengukuran dan pengamatan pekerjaan yang berjalan merupakan pelaksanaan kegiatan pengawasan perparkirandengan membuat catatan sebagai laporan mengenai perkembangan proses manajemen. Maksudnya bagaimana kepatuhan para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementator harus mengetahui apakah orang lain yang terlibat didalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum. Dalam konteks lain, ketika wewenang formal ada, maka sering terjadikesalahan dalam melihat efektifitas kewenangan dan fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan.

Pengawasan dapat diartikan sebagai proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Dalam proses pengawasan adalah membandingkan pekerjaan yang sebenarnya dengan standar-standar dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengawasan dapat dilakukan

dengan cara menggunakan laporan lisan, maksudnya adalah dalam menjalankan pengawasan dengan mengumpulkan fakta-fakta yang ada melalui laporan lisan yang diberi oleh bawahan, pengawasan dengan menggunakan laporan tertulis, maksudnya adalah jika pengawasan dilakukan yaitu melihat laporan yang bertanggung jawab atas melaksanakan pekerjaannya, sesuai pada intruksi-intruksi tugas-tugas yang diserahkan kepadanya dan pengawasan dilakukan melalui laporan pada hal yang sifatnya khusus, artinya adalah pengawasan yang dilakukan oleh seorang pemimpin jika terjadi suatu hal atau kejadian yang istimewa.

Pengumpulan sampah dilakukan di Pasar Kayujati Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir dan dilakukan Sanitary Landfill. Proses merupakan elemen dari sistem yang bertugas untuk mengolah atau memproses seluruh masukan menjadi suatu yang lebih berguna. Proses disini adalah pengolahan sampah yang dibuang di TPA yang dilakukan oleh Seksi Penanganan Dan Pemrosesan Akhir Sampah.

Dalam melakukan pengolahan sampah di Tempat Pembuangan akhir (TPA) Kabupaten Indragiri Hilir menggunakan sistem *sanitary landfill* yaitu *Sanitary landfill* adalah sistem TPA dimana sampah diurug dan dibuang secara sistematis. Setiap hari sel sampah ditutup/dilapisi dengan tanah. Pembuatan ketinggian dan lebar sel sampah juga diperhitungkan. Pada dasar tempat pembuangan, dibuat pipa-pipa pengalir air lindi, di antara sel-sel sampah juga dipasang pipa-pipa penangkap gas metan yang kemudian diolah menjadi energi. Penanganan sampah dengan menggunakan *sanitary landfill* tetap memiliki buangan berupa berbagai macam bentuk gas serta cairan. proses pengolahan sampah yang dilakukan dengan sistem konversi yang keseluruhannya dikenal

dengan proses *Sanitary Landfill* tidak dapat dilakukan secara maksimal karena kendala sumber daya manusia yang tidak memadai dalam hal pengolahan sampah yang menghasilkan gas metan. Selain itu, peralatan yang tidak memadai dan ditemukan beberapa alat yang rusak tentu menjadi penghambat dalam proses pengolahan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kabupaten Indragiri Hilir.

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan Bapak Edian Ady sebagai Operator Timbangan di Pasar Kayujati Tembilahan Pekanbaru pada tanggal 11 Februari 2021 dengan pertanyaan bagaimana pencatatan pengawasan dalam pengelolaan sampah diketahui bahwa :

“masuknya sampah di Pasar Kayujati Tembilahan menimbulkan bau yang tidak sedap, sehingga kondisi seperti ini sangat dikeluhkan oleh warga sekitar, karena tidak nyamannya dalam menghirup udara yang dibutuhkan tubuh dalam proses pernafasan. Sementara itu, petugas di Pasar Kayujati Tembilahan menjelaskan bahwa setiap sampah yang masuk akan dilakukan penyiraman cairan anti bakteri terlebih dahulu agar sampah tersebut tidak menimbulkan aroma yang tidak sedap.”.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara kepada Bapak Ilyanto sebagai Kepala Seksi Penanganan Dan Pemrosesan Akhir Sampah Pada tanggal 11 Februari 2021 dengan pertanyaan bagaimana pencatatan pengawasan dalam pengelolaan sampah, yang menyatakan bahwa:

“Pengumpulan sampah yang dilakukan pada setiap masing-masing penampungan sampah belum dilakukan secara optimal, hal ini dapat dilihat dari adanya beberapa penampungan sampah yang sampahnya tidak diangkut ketempat penampungan sampah. Hal ini dapat membuat pihak dinas tidak ada keringanan khusus untuk memberi toleransi kepada masyarakat untuk membayar retribusi persampahan/kebersihan.”.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara kepada Bapak Mar Bujang sebagai Pengawas Pasar Kayujati Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Pada tanggal 15 Februari 2021 dengan pertanyaan bagaimana pencatatan pengawasan dalam pengelolaan sampah, yang menyatakan bahwa :

“Dalam pemungutan retribusi persampahan/kebersihan juga pihak dinas tidak memberikan bukti pembayaran baik berupa kartu atau karcis pembayaran sehingga dapat menimbulkan kekeliruan bagi masyarakat yang sudah atau belum membayar uang retribusi persampahan/kebersihan. Masyarakat bertanggung juga karena tidak pihak dinas langsung yang turun tangan dalam pemungutan retribusi persampahan/kebersihan maka masyarakat tidak bias menyampaikan segala keluhan sehingga pihak dinas tidak dapat merasakan apa yang masyarakat rasakan”.

Sementara hasil dari wawancara dengan Bapak Aceng sebagai Mandor Pasar Kayujati Tembilahan Pekanbaru pada tanggal 11 Februari 2021 dengan pertanyaan bagaimana pencatatan pengawasan dalam pengelolaan sampah diketahui bahwa:

“permasalahannya disini ya kerja dengan lokasi yang menimbulkan bau menyengat apalagi disaat musim penghujan tiba masih saja tercium dan tentu saja menimbulkan ketidaknyamanan pada saat bernafas. Selain itu, berdasarkan observasi yang dilakukan penulis di lapangan ditemukan, bahwa proses penyiraman pada saat sampah masuk ke TPA tidak semuanya dilakukan penyiraman, mengingat cairan anti bakteri yang terbatas. Dengan kondisi demikian, usaha untuk mengurangi bau yang tidak sedap yang ditimbulkan oleh sampah tidak maksimal”.

Hasil wawancara kepada Bapak Ilyanto sebagai Kepala Seksi Penanganan Dan Pemrosesan Akhir Sampah Pada tanggal 11 Februari 2021, dengan pertanyaan apakah ada membuat catatan permasalahan dalam pengelolaan sampah yang menyatakan :

“Dari laporan yang diberikan oleh pengawas dan mandor TPA maka kami pihak dinas segera membuat laporan atas apa yang mereka sampaikan, baik itu jumlah pengelolaan sampah maupun permasalahan yang lainnya

terkait pengelolaan sampah. Kami sebagai pihak dinas memang bertugas membuat laporan mengenai persampahan ini yang kemudian akan dijadikan arsip”.

Sementara hasil dari wawancara dengan Bapak Aceng sebagai Mandor Pasar Kayujati Tembilahan Pekanbaru pada tanggal 11 Februari 2021 dengan pertanyaan apakah ada membuat catatan permasalahan dalam pengelolaan sampah diketahui bahwa:

“saya harus rutin membuat laporan untuk kegiatan di TPA ini, akan tetapi laporan yang saya buat biasanya berbentuk lisan bukan tulisan, karena setiap saat ada saja masalah dan kendala yang ditemukan dalam pengelolaan sampah ini terutama masalah akomodasi pengelolaan sampah yang selalu dalam keadaan rusak”.

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan Bapak Edian Ady sebagai Operator Timbangan di Pasar Kayujati Tembilahan Pekanbaru pada tanggal 11 Februari 2021 dengan pertanyaan apakah ada membuat catatan permasalahan dalam pengelolaan sampah diketahui bahwa :

“saya membuat laporan jumlah sampah yang masuk setiap harinya karena saya bekerja sebagai operator timbangan, oleh karena itu setiap harinya jumlah sampah yang masuk ada laporannya kemudian diserahkan langsung kepada dinas melalui pengawas maupun mandor TPA”.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara kepada Bapak Mar Bujang sebagai Pengawas Pasar Kayujati Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Pada tanggal 15 Februari 2021 dengan pertanyaan apakah ada membuat catatan permasalahan dalam pengelolaan sampah, yang menyatakan bahwa :

“saya ada juga membuat laporan tapi memang lebih kepada laporan lisan, karena saya bertugas tidak tetap dilapangan satu kelapangan lainnya maka laporan yang disampaikan lebih banyak menggunakan media alat komunikasi seperti handphone ”.

Berdasarkan hasil observasi lapangan diketahui bahwa area pengangkutan sampah yaitu di sekitar pasar kayujati, di bagian depan pasar dan di tepi jalan pasar kayujati. Pasar Kayujati sudah tersedia TPS tetapi tidak tercukupi, sehingga sampah yang ada dibuang ke tepi parit dan menumpuk, ada juga di gorong-gorong dan tepi jalan sehingga mengganggu kenyamanan pembeli karena menimbulkan aroma yang tidak sedap dan menyebabkan terganggunya kenyamanan pedagang dan pembeli di sekitar pasar TPS yang tersedia juga diletakkan jauh dari pasar dan di tepi jalan sehingga menyulitkan pedagang membuang sampah. Akibat besarnya jumlah sampah akibat aktifitas pasar seringkali ditemukan banyaknya timbunan sampah yang dihasilkan dari aktifitas pasar. Berikut dapat dilihat rekap hasil observasi penulis :

Tabel 5.2. Hasil Rekap Observasi Terkait Indikator Tahap Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan

No.	Uraian	Keterangan
1.	Bentuk pengamatan	Pengawasan pengangkutan sampah di pasar Kayu Jati
2.	Waktu kegiatan	Pengawas Pengawas Kebersihan Pasar dan tenaga kerja pengangkut sampah
3.	Tempat pengamatan	Pasar Kayu Jati
4.	Aktor yang terlibat	Hari Senin tanggal 15 Februari 2021
5.	Hasil observasi	Pengumpulan sampah yang dilakukan pada setiap masing-masing penampungan sampah belum dilakukan secara optimal, hal ini dapat dilihat dari adanya beberapa penampungan sampah yang sampahnya tidak diangkut ketempat penampungan sampah. Hal ini dapat membuat pihak dinas tidak ada keringanan khusus untuk memberi toleransi kepada masyarakat untuk membayar retribusi persampahan/kebersihan

Sumber : Hasil Observasi

B.3. Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan

Penafsiran dan perbandingan hasil yang ada dengan standar yang diminta merupakan perbandingan penilaian terhadap pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan dibandingkan dengan penilaian keadaan seberapa jauh penyimpangan pengawasan yang terjadi dari standar serta sebab-sebab penyimpangan. Tindakan perbaikan dapat dilaksanakan sebelum pengawasan yang sebenarnya dapat terlaksana. Tujuan pengawasan adalah mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan untuk dapat benar-benar teralisasi, maka menurut Sukarna (1986: 146) tujuan pengawasan adalah:

- a. Untuk mengetahui apakah segala sesuatunya berjalan sesuai dengan rencana yang telah digariskan.
- b. Untuk mengetahui apakah segala sesuatunya dilaksanakan sesuai dengan intruksi serta azas-azas yang telah ditetapkan.
- c. Untuk mengetahui kesalahan-kesalahan, kelemahan-kelemahan dan kekurangan-kekurangan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan pekerjaan.
- d. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan efisien.
- e. Untuk mencari jalan keluar, bila ternyata dijumpai kesulitan, kelemahan-kelemahan atau kegagalan kearah perbaikan. Jelasnya, bahwa tujuan dari pengawasan adalah untuk memperoleh hasil pekerjaan agar berdaya guna dan berhasil guna.

Hasil wawancara kepada Bapak Mar Bujang sebagai Pengawas Pasar Kayujati Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Pada tanggal 15 Februari 2021

dengan pertanyaan bagaimana pelaksanaan evaluasi terhadap hasil dalam pengelolaan sampah, yang menyatakan bahwa :

“Pembuangan akhir sampah yang dilakukan di Pasar Kayujati Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir kemudian diolah. Pengolahan sampah anorganik yaitu dari tumpukan sampah yang berada di Pasar Kayujati Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir sudah sampai tahap menghasilkan gas metan. Gas metan yang dihasilkan dipakai untuk memasak air oleh petugas yang berjaga di lokasi Pasar Kayujati Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir. Dalam perencanaannya gas metan ini akan diolah lebih lanjut dan di distribusikan ke rumah-rumah warga sekitar, agar dapat dipergunakan sebagai bahan bakar dalam memasak, yaitu pengganti LPG. Namun, sampai saat ini, perencanaan tersebut belum terealisasi dengan baik, karena keterbatasan biaya, peralatan dan sumber daya manusia yang handal dibidang gas metan tersebut. Apabila instalasi sudah terpasang, gas metan akan dapat dialirkan kerumah warga melalui pipa dan dapat dipergunakan untuk memasak. Dengan adanya energi dari gas metan ini, maka dapat menghemat penggunaan LPG yang saat ini dipasaran harganya semakin mahal saja. Dengan adanya energi yang terbarukan dan lebih murah, maka dapat dijadikan energi alternatif untuk memenuhi kebutuhan hidup dan menciptakan kesejahteraan masyarakat”.

Proses merupakan elemen dari sistem yang bertugas untuk mengolah atau memproses seluruh masukan menjadi suatu yang lebih berguna. Proses disini adalah pengolahan sampah yang dibuang di TPA yang dilakukan oleh Seksi Penanganan Dan Pemrosesan Akhir Sampah. Dalam melakukan pengolahan sampah di Tempat Pembuangan akhir (TPA) Kabupaten Indragiri Hilir menggunakan sistem *sanitary landfill* yaitu *Sanitary landfill* adalah sistem TPA dimana sampah diurug dan dibuang secara sistematis. Setiap hari sel sampah ditutup/dilapisi dengan tanah. Pembuatan ketinggian dan lebar sel sampah juga diperhitungkan.

Pada dasar tempat pembuangan, dibuat pipa-pipa pengalir air lindi, di antara sel-sel sampah juga dipasang pipa-pipa penangkap gas metan yang

kemudian diolah menjadi energi. Penanganan sampah dengan menggunakan *sanitary landfill* tetap memiliki buangan berupa berbagai macam bentuk gas serta cairan. proses pengolahan sampah yang dilakukan dengan sistem konversi yang keseluruhannya dikenal dengan proses *Sanitary Landfill* tidak dapat dilakukan secara maksimal karena kendala sumber daya manusia yang tidak memadai dalam hal pengolahan sampah yang menghasilkan gas metan. Selain itu, peralatan yang tidak memadai dan ditemukan beberapa alat yang rusak tentu menjadi penghambat dalam proses pengolahan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kabupaten Indragiri Hilir.

Sementara hasil dari wawancara dengan Bapak Aceng sebagai Mandor Pasar Kayujati Tembilahan Pekanbaru pada tanggal 15 Februari 2021 bagaimana pelaksanaan evaluasi terhadap hasil dalam pengelolaan sampah diketahui bahwa:

“kami disini sudah melakukan tugas dengan sebagaimana mestinya, akan tetapi kami terkendala masih banyak ditemukan terkait banyaknya kerusakan yang terjadi antara lain alat berat yang memiliki fungsi penting dalam mengelola sampah sehingga tidak dapat menimbun seperti sekarang ini. Akan tetapi respon pihak dinas dari kemarena kami sudah memberikan laporan belum ditanggapi dan dilakukan perbaikan alat berat yang rusak sehingga banyak kami yang terkendala untuk melakukan pengelolaan sampah. Pihak pengawas pun tidak pernah mau datang untuk melihat langsung kendala atau permasalahan yang terjadi saat ini di TPA”.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara kepada Bapak Amir Husni sebagai Kepala Seksi Penanganan Dan Pemrosesan Akhir Sampah Pada tanggal 11 Februari 2021, dengan pertanyaan bagaimana pelaksanaan evaluasi terhadap hasil dalam pengelolaan sampah yang menyatakan :

“pelaksanaan tugas kami sudah dilakukan sesuai dengan standard an prosedur yang ditetapkan, kami hanya membuat pelaporan atas

permasalahan yang terjadi atau pelaporan hasil kinerja lapangan setiap harinya”.

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan Bapak Edian Ady sebagai Operator Timbangan di Pasar Kayujati Tembilahan Pekanbaru pada tanggal 11 Februari 2021 dengan pertanyaan bagaimana pelaksanaan evaluasi terhadap hasil dalam pengelolaan sampah diketahui bahwa :

“kalau terjadi permasalahan dalam penimpangan sampah ini palingan hanya sedikit kerusakan program computer ataupun printer untuk kertas bukti penimbangan, kalau masalah besar lainnya tidak ada. Kalaupun terjadi permasalahan tinggal membuat laporan saja kepada pihak dinas kemudian dilakukan perbaikan, tapi memang kenalnya lama untuk melakukan perbaikan tersebut”.

Hasil wawancara kepada Bapak Amir Husni sebagai Kepala Seksi Penanganan Dan Pemrosesan Akhir Sampah Pada tanggal 11 Februari 2021, dengan pertanyaan bagaimana melakukan perbandingan pengawasan dalam pengelolaan sampah yang menyatakan :

“kalau menurut saya jika terdapat permasalahan dalam pengelolaan sampah ini maka akan melakukan pelaporan kepada pihak atasan yang kemudian dikoordinasikan untuk melakukan perbaikan atau penyelesaian atas permasalahan yang terjadi tersebut. Jadi pengawasan dilakukan baik ada atau tidak permasalahan yang terjadi karena akan banyak informasi yang diperoleh dari pengawasan tersebut”.

Sementara hasil dari wawancara dengan Bapak Aceng sebagai Mandor Pasar Kayujati Tembilahan Pekanbaru pada tanggal 11 Februari 2021 dengan pertanyaan bagaimana melakukan perbandingan pengawasan dalam pengelolaan sampah diketahui bahwa:

“permasalahan yang terjadi ini memang sudah menjadi kewajiban saya untuk ikut menangani karena sedikit banyaknya saya yang lebih mengetahui keadaan TPA ini karena menjadi tugas utama saya untuk selalu mengawasi TPA ini. Jadi jika terjadi permasalahan maka saya orang pertama yang akan mengetahuinya terlebih dahulu, oleh karena itu

penting bagi saya selalu membuat laporan perbandingan dari hasil pengawasan saya setiap harinya yang akan saya sampaikan kepada pihak dinas”.

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan Bapak Edian Ady sebagai Operator Timbangan di Pasar Kayujati Tembilahan Pekanbaru pada tanggal 11 Februari 2021 dengan pertanyaan bagaimana melakukan perbandingan pengawasan dalam pengelolaan sampah diketahui bahwa :

“saya membuat laporan jumlah sampah yang masuk setiap harinya karena saya bekerja sebagai operator timbangan, oleh karena itu setiap harinya jumlah sampah yang masuk ada laporannya kemudia diserahkan langsung kepihak dinas melalui pengawas maupun mandor TPA”.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara kepada Bapak Mar Bujang sebagai Pengawas Pasar Kayujati Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Pada tanggal 15 Februari 2021 dengan pertanyaan bagaimana melakukan perbandingan pengawasan dalam pengelolaan sampah, yang menyatakan bahwa :

“saya selalu berkoordinasi dengan mandor TPA jika ada permasalahan yang terjadi, sehingga jika terjadi permasalahan atau tidak saya kan tetap datang ke TPA untuk melakukan pengawasan pengelolaan sampah tersebut karena ada laporan yang akan saya buat”.

Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa kurangnya kesadaran pedagang dalam pemilahan sampah membuat sampah tidak dipilah dan juga masih banyaknya sampah yang berserakan di jalan dan pinggiran parit pasar. Semakin banyaknyakegiatan di pasar maka menyebabkan banyaknya volume sampah yang dihasilkan oleh pedagang maupun pembeli yang berbelanja atau melakukan kegiatan di pasar semakin banyak. Begitu banyaknya dampak negatif yang ditimbulkan dari pengaruh kurang tepatnya pengelolaan sampah di suatu daerah, maka penelitimelakukan penelitian untuk mengetahui proses pengelolaan sampah

pasar yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir. memang adanya kerusakan jalan untuk alat berat yang akan melakukan pengangkutan sampah sehingga tidak tertimbun. Alat berat pun tidak ada yang beropersional karena dalam keadaan rusak. Dan saat ini Pasar Kayujati Tembilahan hanya dijadikan untuk penimbangan sampah dan penyemprotan anti bakteri saja akan tetapi pembuangan sampah dilakukan pada TPA yang baru dibuat oleh pihak dinas tidak jauh dari Pasar Kayujati Tembilahan. Berikut dapat dilihat rekap hasil observasi penulis :

Tabel 5.3. Hasil Rekap Observasi Terkait Indikator Tahap Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan

No.	Uraian	Keterangan
1.	Bentuk pengamatan	Pengawasan pengangkutan sampah di pasar Kayu Jati
2.	Waktu kegiatan	Pengawas Pengawas Kebersihan Pasar dan tenaga kerja pengangkut sampah
3.	Tempat pengamatan	Pasar Kayu Jati
4.	Aktor yang terlibat	Hari Senin tanggal 15 Februari 2021
5.	Hasil observasi	Pelaksanaan tugas sudah dilakukan sesuai dengan standard dan prosedur yang ditetapkan, hanya membuat pelaporan atas permasalahan yang terjadi atau pelaporan hasil kinerja lapangan setiap harinya

Sumber : Hasil Observasi

B.4. Pembandingan Pelaksanaan Dengan Standar dan Analisa Penyimpangan

Tindakan koreksi terhadap penyimpangan merupakan langkah tindakan yang bertujuan untuk mencari kekurangan dalam pelaksanaan pengawasan masalah perpaarkiran yang memberikan bagaimana cara menjelaskan dan menerangkan apa yang menyebabkan terjadi penyimpangan pengawasan.

Salah satu masalah terbesar dengan sanitary landfill adalah bahaya lingkungan. Sebagai bahan dalam lapisan sampah dipadatkan memecah, mereka menghasilkan gas, termasuk metana yang mudah terbakar. Namun gas metana yang dihasilkan melalui teknik sanitary landfill dapat dimanfaatkan untuk sumber listrik yang dapat dialirkan kerumah-rumah penduduk. Tempat pembuangan sampah juga menghasilkan lindi, lindi adalah cairan yang dihasilkan sebagai akibat dari perkolasi air atau cairan lain melalui sampah, dan kompresi dari limbah. Lindi dianggap cairan terkontaminasi, karena banyak mengandung bahan terlarut dan tersuspensi. Lindi merupakan bahan-bahan yang dapat merusak lingkungan alam jika mereka berakhir di meja air. Namun air sampah atau air lindi mempunyai manfaat yaitu dapat diolah menjadi pupuk cair. Manajemen yang baik teknik yang dapat membatasi dampak negatif dari lindi. Selain itu juga bahaya seperti ledakan gas metan juga mengancam TPA (Tempat Pembuangan Akhir) Kabupaten Indragiri Hilir dan juga mengancam keselamatan warga yang tinggal di sekitar TPA (Tempat Pembuangan Akhir) Kabupaten Indragiri Hilir).

Untuk meminimalisir terjadi nya ledakan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Seksi Penanganan Dan Pemrosesan Akhir Sampah Melakukan pengolahan terhadap gas metan tersebut. Dengan adanya pengolahan gas metan (CH_4) ini tentunya saja resiko ledakan dari gas metan ini bisa diminimalisir sehingga hal seperti ledakan gas metan tidak terjadi. Gas Metan sebenarnya merupakan salah satu gas yang berbahaya, karena gas merupakan salah satu dampak efek rumah kaca yang disebabkan global warming pada bumi. Oleh karena itu, selain mengurangi dampak dari efek rumah kaca dengan memanfaatkan gas metan

sebagai sumber energi alternatif, gas metan ini memang dapat mengurangi dampak pencemaran lingkungan akibat penumpukan sampah.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara kepada Bapak Amir Husni sebagai Kepala Seksi Penanganan Dan Pemrosesan Akhir Sampah Pada tanggal 11 Februari 2021 dengan pertanyaan bagaimana mengatasi permasalahan dalam pengelolaan sampah, yang menyatakan bahwa :

“dalam melakukan pengawasan pengelolaan sampah harus dilihat secara tulisan maupun lisan, hal ini bertujuan agar laporan yang dibuat dapat dipertanggungjawabkan oleh pegawai tersebut dan masalah yang terjadi didalam pengelolaan sampah dapat diatasi dengan baik. Melakukan laporan yang dibuat dapat diketahui tingkat pendapatan serta perkembangan masalah yang terjadi yang telah dilaksanakan. Oleh karena itu dalam membuat laporan tersebut pihak Dinas telah menunjuk langsung pegawai yang memegang tanggung jawab membuat laporan tersebut. Dan jika terdapat permasalahan yang terjadi terkait pengelolaan sampah tersebut baru akan ditindaklanjuti untuk perbaikan”.

Walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan kebijakan, mungkin kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan atau terealisasi karena terdapatnya kelemahan dalam birokrasi. Kebijakan begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebarkan sumberdaya-sumberdaya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.

Sementara hasil dari wawancara dengan Bapak Aceng sebagai Mandor Pasar Kayujati Tembilahan Pekanbaru pada tanggal 15 Februari 2021 dengan

pertanyaan bagaimana bagaimana mengatasi permasalahan dalam pengelolaan sampah diketahui bahwa:

“tingkat ketergantungan sampah di Kabupaten Indragiri Hilir hingga saat ini baru mencapai 50 persen saja. Setiap hari menurutnya hanya setengah sampah di Kabupaten Indragiri Hilir yang terangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Namun ia juga mengaku tidak dapat berbuat banyak. Hal itu tidak lepas dari masih jauhnya dari ideal armada truk pengangkut sampah yang dimiliki DLHK dibandingkan dengan produksi sampah Kabupaten Indragiri Hilir. Dengan armada yang ada sekarang, baru 50 persen terangkut. Kendalanya adalah jumlah armada dan anggaran. Jumlah penduduk terus bertambah, produksi sampah juga meningkat. Tapi kami terkendala di kendaraan pengangkut dan anggaran operasionalnya. Saat ini hanya ada sekitar 63 unit armada, itupun 5 unit sudah rusak pula. Pasar Kayujati Tembilahan hanya menerima rata-rata 380 ton sampah perhari. Padahal timbunan atau produksi sampah kota Pekanbaru setiap harinya mencapai 720 ton. Jumlah penduduk bertambah, jumlah sampah pasti bertambah. Apalagi kita baru saja melakukan pengembangan wilayah, ada banyak kelurahan baru, itu artinya produksi sampah terus meningkat. Kalau standar pelayanan minum sesuai sekarang itu 56 persen, harusnya tahun ini sudah mencapai 70 persen. Tapi armada kita tidak mencukupi”.

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan Bapak Edian Ady sebagai Operator Timbangan di Pasar Kayujati Tembilahan Pekanbaru pada tanggal 11 Februari 2021 dengan pertanyaan bagaimana mengatasi permasalahan dalam pengelolaan sampah diketahui bahwa :

“kalau terjadi permasalahan dalam penimbangan sampah ini palingan hanya sedikit kerusakan program computer ataupun printer untuk kertas bukti penimbangan, kalau masalah besar lainnya tidak ada. Kalaupun terjadi permasalahan tinggal membuat laporan saja kepada pihak dinas kemudian dilakukan perbaikan, tapi memang kenalnya lama untuk melakukan perbaikan tersebut”.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara kepada Bapak Mar Bujang sebagai Pengawas Pasar Kayujati Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Pada tanggal 15 Februari 2021 dengan pertanyaan bagaimana mengatasi permasalahan dalam pengelolaan sampah, yang menyatakan bahwa :

“kalaupun terjadi permasalahan di TPA saya selalu bersama mandor TPA untuk mencari solusi dan membuat laporan pengawasan permasalahan yang terjadi ini kepada pihak dinas. Oleh karena itu permasalahan yang terjadi ini akan segera ditangani”.

Hasil wawancara kepada Bapak Amir Husni sebagai Kepala Seksi Penanganan Dan Pemrosesan Akhir Sampah Pada tanggal 11 Februari 2021, dengan pertanyaan bagaimana penilaian penyimpangan dalam pengelolaan sampah yang menyatakan :

“kalau adanya laporan permasalahan yang terjadi terkait pengelolaan sampah maka akan langsung dibuatkan laporan untuk segera ditangani dan pengelolaan sampah akan bekerja kembali. Akan tetapi tindakan perbaikan ini biasanya akan membutuhkan waktu yang cukup lama karena ada berbagai proses yang akan dilakukan, apabila pihak atasan sudah memiliki solusi tepat maka akan segera dilakukan perbaikan atas permasalahan yang terjadi”.

Sementara hasil dari wawancara dengan Bapak Aceng sebagai Mandor Pasar Kayujati Tembilahan Pekanbaru pada tanggal 11 Februari 2021 dengan pertanyaan penilaian penyimpangan dalam pengelolaan sampah diketahui bahwa:

“permasalahan yang terjadi ini memang sudah menjadi kewajiban saya untuk ikut menangani karena sedikit banyaknya saya yang lebih mengetahui keadaan TPA ini karena menjadi tugas utama saya untuk selalu mengawasi TPA ini. Jadi jika terjadi permasalahan maka saya orang pertama yang akan mengetahuinya terlebih dahulu, oleh karena itu penting bagi saya selalu membuat laporan perbandingan dari hasil pengawasan saya setiap harinya yang akan saya sampaikan kepada pihak dinas”.

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan Bapak Edian Ady sebagai Operator Timbangan di Pasar Kayujati Tembilahan Pekanbaru pada tanggal 11 Februari 2021 dengan pertanyaan penilaian penyimpangan dalam pengelolaan sampah diketahui bahwa :

“kalau terjadi permasalahan dalam penyimpangan sampah ini palingan hanya sedikit kerusakan program computer ataupun printer untuk kertas

bukti penimbangan, kalau masalah besar lainnya tidak ada. Kalaupun terjadi permasalahan tinggal membuat laporan saja kepada pihak dinas kemudian dilakukan perbaikan, tapi memang kenalnya lama untuk melakukan perbaikan tersebut”.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara kepada Bapak Mar Bujang sebagai Pengawas Pasar Kayujati Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Pada tanggal 15 Februari 2021 dengan pertanyaan penilaian penyimpangan dalam pengelolaan sampah, yang menyatakan bahwa :

“kalaupun terjadi permasalahan di TPA saya selalu bersama mandor TPA untuk mencari solusi dan membuat laporan pengawasan permasalahan yang terjadi ini kepada pihak dinas. Oleh karena itu permasalahan yang terjadi ini akan segera ditangani”.

Dari hasil observasi diketahui memang adanya armada yang mengalami kerusakan yang cukup banyak dan tidak segera dilakukan perbaikan sehingga menjadi terkendala dalam pengangkutan sampah. Hal ini tentu saja dapat berdampak pada penumpukan sampah di TPS dan pengelolaan sampah tidak dapat dilakukan secara tepat waktu sedangkan pengangkutan sampah harus dilakukan setiap hari. Pasar Kayujati menghasilkan sampah setiap harinya lebih kurang 2000 kg/hari, lalu sampah akan diangkut ke TPA, alat pengangkutan seperti truk sampah ada 1 unit, gerobak sampah ada 1 unit. Biasanya pengangkutan sampah ke TPA dilakukan sebanyak 2 kali sehari dipagi dan disiang hari. Pengangkutan sampah dilakukan oleh petugas TPA sebanyak 5 orang yang ada di truk pengangkut sampah, dan 1 orang yang menggunakan gerobak sampah. Berikut dapat dilihat rekap hasil observasi penulis :

Tabel 5.4. Hasil Rekap Observasi Terkait Indikator Tahap Perbandingan Pelaksanaan Dengan Standar dan Analisa Penyimpangan

No.	Uraian	Keterangan
1.	Bentuk pengamatan	Pengawasan pengangkutan sampah di pasar Kayu Jati
2.	Waktu kegiatan	Pengawas Pengawas Kebersihan Pasar dan tenaga kerja pengangkut sampah
3.	Tempat pengamatan	Pasar Kayu Jati
4.	Aktor yang terlibat	Hari Senin tanggal 15 Februari 2021
5.	Hasil observasi	Dalam melakukan pengawasan pengelolaan sampah harus dilihat secara tulisan maupun lisan, hal ini bertujuan agar laporan yang dibuat dapat dipertanggungjawabkan oleh pegawai tersbut dan masalah yang terjadi didalam pengelolaan sampah dapat diatasi dengan baik. Melakukan laporan yang dibuat dapat diketahui tingkat pendapatan serta perkembangan masalah yang terjadi yang telah dilaksanakan. Oleh karena itu dalam membuat laporan tersebut pihak Dinas telah menunjuk langsung pegawai yang memegang tanggung jawab membuat laporan tersebut. Dan jika terdapat permasalahan yang terjadi terkait pengelolaan sampah tersebut baru akan ditindaklanjuti untuk perbaikan

Sumber : Hasil Observasi

B.5. Pengambilan Tindakan Koreksi

Perbandingan hasil akhir dengan masukan yang telah terjadi merupakan proses pelaksanaan pengawasan yang dilakukan terhadap hasil pengawasan yang dihasilkan berdasarkan standar yang telah ditentukan.

Dalam melakukan pengolahan sampah di Pasar Kayujati Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Seksi Penanganan Dan Pemrosesan Akhir Sampah juga melakukan pengolahan sampah menjadi pupuk kompos, pengomposan ini membantu mengurangi sampah di TPA walaupun hanya sedikit dan pengolahan dengan melakukan pengomposan membantu mengurangi

pencemaran lingkungan. Sampah organik seperti sisa makanan, pembusukan dari tumbuhan, dan lain-lain dilakukan pengolahan dengan pengomposan. Melalui proses pengomposan sampah organik yang bersifat mudah terurai dapat berubah bentuk menjadi pupuk yang dapat dimanfaatkan untuk tumbuhan.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara kepada Bapak Amir Husnisebagai Kepala Seksi Penanganan Dan Pemrosesan Akhir Sampah pada tanggal 11 Februari 2021 dengan pertanyaan bagaimana tindakan pembersihan wilayah pembuangan sampah, yang menyatakan bahwa :

“Dalam melakukan pengolahan sampah di Pasar Kayujati Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Seksi Penanganan Dan Pemrosesan Akhir Sampah juga melakukan pengolahan sampah menjadi pupuk kompos, pengomposan ini membantu mengurangi sampah di TPA walaupun hanya sedikit dan pengolahan dengan melakukan pengomposan membantu mengurangi pencemaran lingkungan. Sampah organik seperti sisa makanan, pembusukan dari tumbuhan, dan lain-lain dilakukan pengolahan dengan pengomposan. Melalui proses pengomposan sampah organik yang bersifat mudah terurai dapat berubah bentuk menjadi pupuk yang dapat dimanfaatkan untuk tumbuhan. Pupuk kompos merupakan pupuk alami yang ramah lingkungan dari pada pupuk kimia buatan yang diproduksi oleh industri pupuk pada umumnya”.

Sementara hasil dari wawancara dengan Bapak Aceng sebagai Mandor Pasar Kayujati Tembilahan Pekanbaru pada tanggal 15 Februari 2021 dengan pertanyaan bagaimana tindakan pembersihan wilayah pembuangan sampah diketahui bahwa :

“butuh waktu lebih untuk mengangkut sampah setiap hari. Tidak hanya itu jumlah pekerja tidak seimbang dengan beban pekerjaan yang harus diselesaikan setiap hari yaitu melayani pengangkutan sampah dengan jangkauan wilayah Kabupaten Indragiri Hilir yang begitu luas dengan jutaan penduduk. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pengelolaan sampah yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir belum menerapkan konsep yang terintegritas dengan baik dari satu tahap ke tahap lainnya. Jangan heran jika selalu ada sampah yang masih tertumpuk di tepi jalan. Seakan-akan selalu saja ada sampah berlebihan.

Karena faktanya setengah sampah di Pekanbaru ini tidak terangkut oleh truk armada angkut sampah”.

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan Bapak Edian Ady sebagai Operator Timbangan di Pasar Kayujati Tembilahan Pekanbaru pada tanggal 11 Februari 2021 dengan pertanyaan bagaimana tindakan pembersihan wilayah pembuangan sampah diketahui bahwa :

“kami hanya bisa menumpuk sampah yang terus berdatangan saja, akan tetapi karna Pasar Kayujati Tembilahan ini sudah terlalu banyak penumpukan sampah dan belum bisa diolah maka ada kewenangan baru untuk membuang sampah pada TPA baru jadi disini hanya untuk menimbang dan penyemprotan anti bakteri saja”.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara kepada Bapak Mar Bujang sebagai Pengawas Pasar Kayujati Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Pada tanggal 15 Februari 2021 dengan pertanyaan bagaimana tindakan pembersihan wilayah pembuangan sampah, yang menyatakan bahwa :

“masalah pembersihan memang tidak bisa dilakukan secara efektif terutama wilayah TPA ini sudah banyak sampah yang menumpuk, tuntut melakukan pembersihan pun banyak akan menggunakan alat operasional yang mana saat ini sedang mengalami kerusakan jadi susah kami untuk melakukan pembersihan wilayah TPA ini”.

Hasil wawancara kepada Bapak Amir Husni sebagai Kepala Seksi Penanganan Dan Pemrosesan Akhir Sampah Pada tanggal 11 Februari 2021, dengan pertanyaan bagaimana mencari solusi permasalahan dalam pengelolaan sampah yang menyatakan :

“sampai pada saat ini tidak banyak solusi yang bisa dilakukan dalam pengelolaan sampah ini karena banyak kendalanya antara lain alat operasional yang banyak rusak sehingga sampah yang menumpuk sudah terlalu banyak dan jumlah tenaga kerja yang minim yang tidak bisa optimal mengolah sampah menjadi kompos dan juga masalah dana operasional yang digunakan untuk mengelola sampah”.

Sementara hasil dari wawancara dengan Bapak Aceng sebagai Mandor Pasar Kayujati Tembilahan Pekanbaru pada tanggal 11 Februari 2021 dengan pertanyaan bagaimana mencari solusi permasalahan dalam pengelolaan sampah diketahui bahwa:

“kalau saya sebagai mandor permasalahan yang terjadi coba saya diskusikan dengan pihak dinas, saya juga ada memberikan solusi tetapi tetap mereka yang memutuskan dan merencakana, jadi kami hanya memberi laporan saya terkait permasalahan yang terjadi”.

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan Bapak Edian Ady sebagai Operator Timbangan di Pasar Kayujati Tembilahan Pekanbaru pada tanggal 11 Februari 2021 dengan pertanyaan bagaimana mencari solusi permasalahan dalam pengelolaan sampah diketahui bahwa :

“kalau solusi ya kami tidak banyak bisa mengambil tindakan karena kami sebagai operasional yang melakukan kegiatan pengolahan sampah. Permasalahan yang terjadi biasanya langsung ditanggapi tetapi tindakan perbaikan yang agak sedikit lama karena harus menunggu keputusan atasan dan dana yang disediakan”.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara kepada Bapak Mar Bujang sebagai Pengawas Pasar Kayujati Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Pada tanggal 15 Februari 2021 dengan pertanyaan penilaian penyimpangan dalam pengelolaan sampah, yang menyatakan bahwa :

“solusi yang terjadi di pasar ini hanya terkait masalah alat operasional yang sering terjadi kerusakan sehingga pengolahan sampah jadi terhambat jadi kami yang mengetahui permasalahan yang terjadi hanya memberikan laporan dan solusi nya orang dinas yang berwenang memberikan keputusannya jadi ya sabar saja lah kalau lama perbaikannya”.

Dari hasil observasi diketahui bahwa sampah yang sudah menumpuk di Pasar Kayujati Tembilahan Pekanbaru ini tidak ada dilakukan pengolahan dengan

alasan alat berat yang rusak sehingga sampai sekarang ini sampah yang menumpuk tersebut dikelola. Hal ini tentu saja menambah resah untuk kedepannya karena tidak dapat ditangani dengan baik dan pekerjaan di Pasar Kayujati Tembilahan tidak dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Petugas kebersihan ada yang tidak menggunakan masker maupun sarung tangan dalam proses pengangkutan sampah, dikarenakan mereka sudah terbiasa seperti itu padahal sangat berdampak pada kesehatan. Hal ini perlu diperhatikan untuk kesehatan petugas dan pengarahannya oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan. Berikut dapat dilihat rekap hasil observasi penulis :

Tabel 5.5. Hasil Rekap Observasi Terkait Indikator Tahap Pengambilan Tindakan Koreksi

No.	Uraian	Keterangan
1.	Bentuk kegiatan	Pengawasan pengangkutan sampah di pasar Kayu Jati
2.	Yang melaksanakan kegiatan	Pengawas Kebersihan Pasar dan tenaga kerja pengangkut sampah
3.	Tempat pengamatan	Pasar Kayu Jati
4.	Waktu kegiatan	Hari Senin tanggal 15 Februari 2021
5.	Hasil observasi	Dalam melakukan pengolahan sampah di Pasar Kayujati Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Seksi Penanganan Dan Pemrosesan Akhir Sampah juga melakukan pengolahan sampah menjadi pupuk kompos, pengomposan ini membantu mengurangi sampah di TPA walaupun hanya sedikit dan pengolahan dengan melakukan pengomposan membantu mengurangi pencemaran lingkungan

Sumber : Hasil Observasi

C. Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Dalam Pengawasan Sampah Pasar Kayujati Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir

Berikut ini akan diuraikan mengenai hambatan yang terjadi serta upaya yang dilakukan dalam Pelaksanaan Tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Dalam Pengawasan Sampah Pasar Kayujati Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, yaitu :

Hambatan yang dihadapi oleh Seksi Penanganan Dan Pemrosesan Akhir Sampah antara lain :

a) Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan unsur penting dalam pelaksanaan suatu sistem. Sumber daya manusia menjadi penggerak suatu sistem. Tanpa adanya sumber daya manusia yang terampil memiliki kompetensi yang handal dibidangnya dengan didukung jumlah sumber daya manusia yang memadai akan dapat mewujudkan keberhasilan dari pelaksanaan suatu sistem. Petugas Pasar Kayujati Tembilahan belum cukup dari segi jumlah dan kualitas. Walaupun sudah dibekali dengan pelatihan dalam proses pengolahan sampah di Pasar Kayujati Tembilahan tetapi dari segi latar belakang pendidikan tenaga honorer terdapat 2 (dua) orang hanya tamatan sekolah menengah atas (SMA). Selain itu, produk yang dihasilkan berupa gas metan tentu saja tidak dapat dikembangkan dan dikelola dengan baik karena sumber daya manusia yang membidangi masalah tersebut hanya berjumlah 1 (satu) orang saja dan sering sekali tidak masuk kerja. Dengan

demikian sistem pengolahan sampah tentu saja tidak berjalan dengan baik karena sumber daya manusia yang dibutuhkan belum memadai. Perlu adanya penambahan dan perekrutan sumber daya manusia yang sesuai kompetensi dan jumlahnya agar sistem pengolahan sampah dapat berjalan dengan baik.

b) Sarana dan Prasarana

Sarana prasana merupakan unsur pendukung dan faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan suatu sistem. Sarana prasarana yang dimaksud adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan dalam proses pengolahan sampah di Kabupaten Indragiri Hilir. Sarana prasana seperti alat berat yang berguna dalam proses pendataran sampah dan penimbunan tanah tidak memadai. Alat berat yang dimiliki berjumlah 10 unit dengan kondisi 5 diantaranya rusak berat, 4 unit rusak ringan dan 1 unit kondisi baik. Dalam hal ini, hanya 1 (satu) unit saja yang berfungsi dengan baik dan dapat digunakan dalam proses penimbunan sampah yang di Pasar Kayujati Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir. Dengan demikian, langkah perawatan dan perbaikan terhadap peralatan perlu untuk dilakukan, agar sistem pengolahan sampah tetap berjalan. Selain itu penerapan teknologi modern di TPA juga harus di perhatikan oleh pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dan juga Seksi Penanganan Dan Pemrosesan Akhir Sampah dalam melakukan pengolahan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sehingga nanti nya sampah tidak lagi

menjadi barang yang tidak berguna, melainkan justru menjadi barang yang bernilai ekonomis.



Dokumen ini adalah Arsip Mlik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pelaksanaan Tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Dalam Pengawasan Sampah Pasar Kayujati Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir dalam kategori cukup terlaksana. Hal ini dilihat dari pngangkutan sampah yang tidak dilakukan secara ruïn dan tepat waktu serta kurangnya tenaga kebersihan di pasar.
2. Faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam pengawasan sampah Pasar Kayujati Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir adalah kurangnya sumber daya manusia yang belum memadai dilihat dari segi jumlah dan kualitas, kemudian sarana prasarana yang tidak didukung dengan kegiatan perawatan dan perbaikan alat, sehingga pengolahan sampah di Pasar Kayujati Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir terhambat karena kondisi peralatan yang rusak.

B. Saran

Dari kesimpulan di atas, maka penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut.

1. Menggalakkan penyuluhan terhadap para masyarakat agar lebih bijak untuk membuang dan memanfaatkan sampah sehingga tidak terlalu banyak sampah yang dibuang.
2. Diadakannya penyesuaian terhadap daya tampung TPA sehingga sampah terus dapat diproses dan tidak menyebabkan timbunan gunung sampah.
3. Mengadakan pertemuan secara berkala antara pengawas dengan mandor sehingga dapat menemukan cara untuk segera memproses sampah yang semakin menumpuk.
4. Sebaiknya dilakukan perbaikan atau teknik pengolahan sampah yang lebih efektif sehingga sampah tidak menjadi lebih bertumpuk sehingga akan susah untuk mengolahnya.
5. Pihak Dinas harus cepat tanggap atas permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan sampah sehingga permasalahan yang terjadi dapat segera diselesaikan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

a. Buku-buku

- Abidin, Z.S., 2002, *Kebijakan Publik*, Jakarta, Yayasan Pancur Siwah.
- Agus Purwanto, Erwan dan Dyah Ratih Sulistyastuti, 2012, *Metode Penelitian Kuantitatif, Untuk Admnistrasi Publik, dan Masalah-masalah Sosial*, Gaya Media Yogyakarta
- Dwijowijoto, R.N, 2008, *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, Jakarta : Elex Media Komputindo.
- Edwards III George. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington, D.C. Robert L. Peabody
- Ehrenberg, Ronald G., dan Smith, Robert S, 2003. *Modern Labor Economics: Theory and Public Policy, Eight Edition*. Pearson Education, Inc. New York City.
- Feriyanto, Andri, 2015. *Pengantar Manajemen (3 In 1)*. Yogyakarta. Mediaterra.
- Gie The Liang, 2000, *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah Di Negara Republik Indonesia; suatu analisa tentang masalah-masalah desentralisasi dan cara-cara penyelesaiannya*, Jilid I, Gunung Agung, Jakarta
- Hamidi Jazim, 1999, *Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak(AAUPL) Di Lingkungan Peradilan Administrasi Indonesia*, Cetakan I, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Hanif, Nurcholis. 2005. *Teori dan Praktik Pemerintahan dalam Otonomi Daerah*. Jakarta:Grasindo.
- Ibrahim Jimmy Mohamad, 2004, *Prospek Otonomi Daerah; Dalam Rangka Memberikan Peranan Yang Lebih Besar Kepada Pemerintah Daerah Tingkat II*, Cetakan I, Dahara Prize, Semarang
- Ikram,dkk.1990. Peranan Pasar Terhadap Masyarakat
- Islamy, M. Irfan, 2000, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Jakarta: Sinar Grafika.

- Kaho Joseph Riwu, 1997, *Prospek Otonomi Daerah Di Negara RepublikIndonesia; identifikasi beberapa faktor yang mempengaruhipenyelenggaraannya*, Edisi I, Cetakan IV, RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Koentjoro Diana Halim, 2004, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan 1, Ghalia Indonesia
- Kuper Adam & Yessica Kuper, 2000, “*Ensiklopedia Ilmu-Ilmu Sosial*”, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Labolo, Muhadam. 2010. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta:Rajagrafindo Persada
- Manan, Bagir, 2001, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum UII, Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2002, “*Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*”. Penerbit ANDI, Yogyakarta.
- Murti Sumarni dan Salamah W. 1995. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Penerbit Andi Offset.
- Munaf, Yusri, 2016. *Hukum Administrasi Negara*, Marpoyan Tujuh. Pekanbaru
- Nazir. 1999. *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta:Rineka Cipta
- Ndraha, Taqliziduhu, 1997, *Pembangunan Masyarakat*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Nyimas Dwi Koryati;dkk. 2005. *Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Wilayah*. Yogyakarta : YPAPI
- Pressman, J.L. and Wildavsky, 2012. *Implementation*. Barkley and Los Angeles: University of California Press
- Rasyid Ryaas. 1997. *Makna Pemerintahan*. Jakarta: Mutiara Sumberdaya
- Sedarmayanti. 2004. *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan*. Bandung: Refika Aditama
- Suharto, Edi, 2005, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, PT. Refika Aditama, Bandung.

Supriatna, Tjahya, 1996, *Birokrasi, Pemberdayaan, dan Pengentasan Kemiskinan*, Humaniora Utama Press, Bandung.

Suryadi. 1975. *Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik*. Bandung: PT. Reflika Aditama.

Syafiie, Inu Kencana, 2005. *Ilmu Pemerintatym (edisi revisi)*. Mondar Maju, Bandung.

Tangkilisan, Hessel Nogi S. Drs. 2003. *Kebijakan Publik Yang Membumi*. Lukman Offset & YPAPI. Yogyakarta.

Van Meter, D.S. and Van Horn, C.E. 1975. *The Policy Implementation Process : A Conceptual framework.*” Administration And Society. February

Wahab, Solichin Abdul. 2004. *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: PT. Bumi Aksara

Yudoyono, Bambang. 2001. *Otonomi Daerah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

b. Dokumentasi :

Undang-undang Dasar 1945

Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Wikipedia Indonesia (www.wikipedia.com)